

Bro 2870
11

PKI dan MPRS

PKI dan MPRS

D. N. Aidit

Njoto

Ir. Sakirman

Njono

Asmu

Nursuhud

K. Supit

J. P. Rissi

U. Lesteluhu

M. Tanggap Peleng

Suharti Suwanto

Sukarno

Joop Morriën
Amsterdam



Jajasan „Pembinaan”
Djakarta 1961

3

dan dalam mengambil keputusan² yang tepat sesuai dengan tugas sedjarah Rakjat Indonesia dalam tingkat perjuangannya sekarang ini.

Ketua

Comite Central

Partai Komunis Indonesia

D.N. Aidit

Djakarta, 22 Djanuari 1961.

Dua ketetapan persedjarah tsb. diambil oleh MPRS dengan suara bulat. Golongan politik Nasionalis, Agama dan Komunis serta semua golongan karis mem- berikan suara persetujuannya dengan tepak tangan yang gemuruh, sesudah masing-masing memberikan alasan- nya.

Saja sangat gembira dengan pemberian per- misian dengan ini menjadi terpuksukalah untuk se- lamanya dan saya menuliskan dalam ketetapan MPRS tsb. Kami Ko- muniste tidak hanya telah ambilpadian yang sangat tua- dalam semua sidang MPRS, tetapi juga telah me- ngemukakan banyak kritikan yang realistis sehingga sa- ngat membantu dalam mempertajam ketetapan MPRS

D.N. Aidit

Putusan² MPRS harus dilaksanakan dengan tenaga² anti-imperialisme dan anti-feodalisme yang lebih konsekwen

Pada tgl-7 Desember 1960 MPRS telah menutup sidangnya yang pertama setelah madjelis tertinggi Rak- jat Indonesia ini mengambil dua ketetapan penting, yaitu tentang Garis² Besar Haluan Negara dan Garis² Besar Pola Pembangunan.

Dengan adanya ketetapan pertama menjadi diresmi- kanlah oleh lembaga negara tertinggi garis perjuangan Rakjat Indonesia dalam melikwidasi imperialisme dan sisa² feodalisme; dalam membangun kehidupan nasio- nalnya yang berharidepan Sosialisme, dalam pelaksana- an politik luarnegeri yang anti-imperialisme dan untuk perdamaian dunia; dan dalam mewujudkan kekuasaan politik gotongrojong daripada Rakjat Indonesia yang berjuang.

Dengan adanya ketetapan nomor dua, maka untuk pertama kali Rakjat Indonesia lewat madjelis tertinggi- nya merumuskan program bersama mengenai bidang kehidupan yang bersifat materiil maupun kulturil. Saja berpendapat bahwa program bersama ini, baik yang di- muat dalam ketetapan nomor dua maupun yang dimuat dalam lampiran²nya, adalah mentjerminkan semangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme yang kuat dari Rakjat Indonesia, semangat ingin membina hidup baru yang modern dan progresif.

Perumusan ketetapan nomor dua tentang "landreform" (perubahan tanah) adalah baik, pokoknya sistim tuantanah harus hapus dan tanah hanya untuk mereka yang menggarap.

Perumusan² tentang perekonomian pada umumnya adalah baik, tjukup disadari tentang pentingnya dan utamanja peranan sektor negara dibidang industri, distribusi, impor-export, perhubungan dsb.

Semangat anti-imperialisme begitu kuatnja didalam MPRS sehingga usaha sementara orang untuk mentjantumkan "penanaman modal asing" dalam rangka pembiajaan pola dalam salahsatu dokumen MPRS mendjadi gagal samasekali. Soal "penanaman modal asing" sangat tidak populer dikalangan anggota² MPRS pada umumnya. Ini sepenuhnya sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam ketetapan nomor dua djuga ditjantumkan tentang agama mendjadi matapelajaran di SR sampai dengan Universitas² Negeri dengan pengertian bahwa murid² berhak tidak ikutserta apabila walimurid atau murid dewasa menjatakan keberatannja. Katun Komunis menerima perumusan ini, jang didjadi sjarat mutlak dari fihak Islam karena perumusan ini masih tetap mendjamin kesukarelaan dalam soal agama, bahwa tidak ada paksaan dalam soal agama. Ini adalah toleransi jang realistis baik dari fihak Komunis maupun dari fihak nasionalis dan kaum rasionalis lainnja.

Pendeknja, dengan ketetapan nomor satu dan nomor dua MPRS telah mentjiptakan iklim politik jang baik, jang harus dipelihara dan dikembangkan. Iklim politik sematjam ini tidak pernah didapat oleh Rakjat Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini. MPRS sebagai madjelis tertinggi Rakjat Indonesia telah merumuskan program garis besar dan program terperinci untuk melikwidasi imperialisme dan feodalisme dari permukaan bumi Indonesia sebagai sjarat mutlak untuk masjarakat sosialis dikelak kemudian hari.

Program ini tidak mungkin dilaksanakan oleh orang² jang bersikap bantji terhadap imperialisme dan feodalisme, orang² jang hanya separoh² melawan imperialisme dan feodalisme. Program ini hanya dapat dilaksanakan oleh orang² jang kuat bersemangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan oleh orang² jang benar² bertjita² Sosialisme, ber-tjita² hapusnja penghisapan atas manusia oleh manusia.

Banjak orang bertanja tentang apa sebabnja MPRS bisa bekerdja tjepat dan tepat. Saja berpendapat, bahwa ini dimungkinkan per-tama² karena tepatnja Presiden Sukarno menundjuk pimpinan MPRS, jaitu NASAKOM jang dipadu dengan karja (sivil dan militer). Kemudian pimpinan MPRS ini mendjalankan kebidjaksanaan sesuai dengan kebidjaksanaan Presiden Sukarno ini. Dengan ini banjak purbasangka dan kontradiksi² jang tak perlu dapat dihindari.

Komposisi pimpinan MPRS dan tjara-kerdja MPRS adalah model bagi Republik Indonesia untuk bisa bekerdja tjepat dan tepat. Apalagi untuk pelaksanaan Garis² Besar Pola Pembangunan, model ini harus benar² ditjontoh. Djika tidak, maka tidak ada satu soal penting dan pokok jang dapat diselesaikan setjara tjepat dan tepat di Indonesia.

Bandung, 8 Desember 1960

Republik Indonesia
dalam pemerintahan mendirikan dan mempertahankan
Republik Indonesia

Njoto

Alasan² Golongan Komunis memper- kuat Manipol dan perperintjiannja sebagai Garis² Besar daripada Haluan Negara

Saudara Ketua dan pimpinan sidang jang terhormat,
Madjelis jang mulia, jang berperintahnja sebagai
Djalan perjuangnja sesuatu bangsa tidak pernah
mudah. Begitupun djalan perjuangan bangsa kita men-
tjapai suatu Indonesia jang merdeka penuh, bersatu,
demokratis, adil dan makmur.

Sudah selang 15 tahun lebih sedjak Revolusi Agustus
jang abadi itu mengobrak-abrik kehidupan lama dan
mendirikan diatas reruntuksnja kehidupan baru. Berapa
banjak pengorbanan jang telah diberikan, berapa besar
keichlasan Rakjat kita dalam perjuangan jang besar
itu, namun banjak masih idam²an kita jang tinggal
idam²an. Politik „petjahbelah dan kuasai“ kaum impe-
rialis masih berhasil memisahkan Irian Barat dari pulau-
pulau saudaranja, modal monopoli asing masih me-
nguasai sebagian dari hidup perekonomian kita, „djuga
invasi „kultur“ imperialis jang merusak seperti tjandu,
masih belum berachir. Presiden Sukarno tahu berterima-
kasih ketika beliau didalam „Amanat Negara“nja me-
ngenang djasa² pemimpin² politik jang patriotik dari
dulu hingga sekarang, dan mengenang pula djasa pra-
djurit² kita, resmi maupun tak resmi, jang punja andil

dalam perjuangannya mendirikan dan mempertahankan Republik.

Salah seorang penjair kita sekali pernah berkata :

*Aku tjinta merdeka
karena aku kenal derita*

dan dalam bait yang padat ini tersimpullah tekad merdeka bangsa kita yang diamanatkan oleh penderitaan Rakjat. Kaum Komunis Indonesia adalah sebagian dari Rakjat yang sepenanggungan, seperjuangan dan seharedepan dengan Rakjat itu sendiri.

Oleh sebab itu kaum Komunis Indonesia, yang suaranya saja wakili, menjetudju dengan tanpa tjadangan sedikitpun hasil kerdja Komisi Manipol, yang berpokok memperkuat Manifesto Politik RI yang sudah kuat itu beserta diperperintjiannya sebagai garis² besar daripada haluan negara, menetapkan „Amanat Pembangunan” Presiden sebagai garis² besar daripada haluan pembangunan, dan menetapkan „Djalannya Revolusi Kita” dan „Pidato PBB” Presiden sebagai bagian² yang tak terpisahkan dari Manifesto Politik.

Hanya 3 minggu sesudah Manifesto Politik diutjapkan oleh Presiden Sukarno, jaitu didalam Kongres Partainya 7 September 1959 kaum Komunis Indonesia memutuskan dalam suatu Resolusi, menganggap „Manipol RI” sebagai „dokumen penting bagi Rakjat Indonesia dalam melanjutkan revolusi nasionalnya yang belum selesai” dan berseru kepada seluruh Rakjat Indonesia „untuk mempelajari dan mendiskusikan Manifesto Politik Presiden Sukarno, menjadikannya pegangan dalam membantu menjokong dan menagih pelaksanaan program Kabinet Kerdja”.

Kemudian, seperti kita semua maklum, berturut² pada 25 September DPA memutuskan Manipol itu garis² besar haluan negara dan memberikan diperperintjian atasnya, pada tanggal 10 November Presiden Sukarno me-

njetudju keputusan DPA beserta diperperintjiannya itu, pada tanggal 30 November Kabinet Kerdja dan pada akhir tahun 1959 Depernas menjetudjuinya pula.

Tepat yang diterangkan dalam keputusan DPA bahwa „Dengan adanya Manifesto Politik ini untuk pertama kalinya Republik Indonesia, setelah berumur 14 tahun, mengumumkan lewat Kepala Negeranya sebuah dokumen bersedjarah yang mendjelaskan Persoalan² Pokok dan Program Umum Revolusi yang bersifat menjeluruh”.

Pernah kita di-hari² revolusi, jaitu pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1948, menjusun suatu Program Bersama yang didukung bulat oleh Nasakom dan yang ketika itu disusun dibawah pimpinan patriot besar almarhum mahaputera Ki Hadjar Dewantara. Tetapi Program Bersama itu program Rakjat semata, sedang Manipol sekarang ini ja program Rakjat, ja program partai², ja program organisasi² massa, ja program Pemerintah, ja program atau garis² besar haluan negara.

Terlalu banyak sudah disepandjang waktu 15 tahun lebih ini enerzi ter-sia², kans² terbuang, bahkan djatuh pula pengorbanan² yang tidak perlu. Semua ini tentu harus ada akhirnya, djika kita ingin melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja. Patokannya sebenarnya bersahadja : kita beladjar dari kesalahan² yang sudah², kita mentjegah terulangnja kesalahan² itu kembali, dan kita ubah kesalahan² mendjadi kebenaran², kegagalan² mendjadi sukses², kekalahan² mendjadi kemenangan².

Manifesto Politik dan Perperintjiannya memberi pegangan kepada kita untuk beladjar dari sedjarah kita sendiri, dari penjelewengan² yang pernah terdjadi dan dari ketepatan² yang pernah ditempuh. Didalam „Djalannya Revolusi Kita” Presiden Sukarno tegas mengatakan, bahwa kalau ingin tahu lebih terang apakah dasar-tudjuan dan kewadjiban revolusi Indonesia, kalau ingin tahu lebih terang apakah kekuatan² sosial revolusi Indonesia, apakah sifat revolusi Indonesia, apakah hari-

depan revolusi Indonesia, apakah musuh² revolusi Indonesia — kita „batjalah perintjian Dewan Pertimbangan Agung". Didalam „Djalannja Revolusi Kita" itu Presiden Sukarno mengatakan pula bahwa dengan djelasnja Manipol-Usdek, kita harus tahu „siapa kawan siapa lawan, siapa sahabat siapa musuh, siapa pro siapa kontra. Siapa pro Manipol dan Usdek adalah *kawan*. Siapa kontra Manipol dan Usdek adalah *lawan*. Didalam tiap² perdjjuangan, — apalagi dalam Revolusi —, maka adalah satu keharusan mengetahui siapa *kawan* dan siapa *lawan*. Berbahaja sekali," kata Presiden kemudian, „untuk tidak mengetahui siapa-kawan-siapa-lawan itu. Berbahaja sekali untuk tidak mengetahui *kutubusuk² didalam selimut!*" Pendeknja, berbahaja sekali „djika penetapan siapa kawan siapa lawan itu dilakukan setjara *subjektif*. Sebab penetapan setjara subjektif itu mudah sekali 'salah wissel', sehingga menimbulkan pertentangan² yang tidak perlu dikalangan Rakjat". Ja, penetapan siapa-kawan-siapa-lawan setjara subjektif, Saudara Ketua, itulah yang diusahakan setiara intensif oleh musuh² Revolusi kita, musuh² Rakjat kita.

„Salah wissel" harus ditjegah dalam konstelasi politik didalam negeri. Sebab masih ada misalnja kaum yang tidak suka akan persatuan Nasakom, padahal Presiden Sukarno menggariskan didalam „Djarek" bahwa kegotongrojongan Nasakom adalah „konsekwensi-politik yang terpenting", saja ulangi lagi, „konsekwensi-politik yang terpenting bagi semua pendukung Manifesto Politik dan Usdek, satu konsekwensi-politik yang tidak plintat-plintut atau plunkar-plunker". „Djika tidak", kata Presiden selandjutnja, „maka semua omongan tentang Gotongrojong, Manifesto Politik, Usdek, Front Nasional, 'setia kepada Revolusi', dan lain sebagainya, hanjalah omongkosong belaka, *lipservice* belaka". Bahwa menerima Manipol tetapi tidak menerima Nasakom itu omongkosong belaka, hal ini distrès lagi oleh Presiden Sukarno baru² ini di Surabaya. Hal ini lebih² lagi pentingnja disedari, karena „langkah² rak-

sasa" sekarang ini berhasil diajungkan oleh MPRS, djustru berkat pimpinan gotongrojong.

„Salah wissel" djuga harus ditjegah dalam kita menghadapi dunia luar. Musuh kita, seperti digariskan Manipol, adalah imperialisme. Sungguhpun begitu masih ada yang memusuhi yang anti-imperialis, dan mengawani yang imperialis. Malahan ada misalnja yang menjebut Inggris itu „suatu negeri sosialis", meskipun Inggris mengangkangi banjak djadjaan. Sebaliknya, negeri² sosialis, kepada siapa — seperti dikatakan Presiden Sukarno di Bandjarmasin dan Palembang baru² ini — kita boleh berterimakasih, terkadang disebut „imperialis". Kita lihatlah „salah wissel" ini : negeri sosialis disebut „imperialis", negeri imperialis disebut „sosialis"! Dalam karjanja yang piawai, „Mentjapai Indonesia Merdeka", Bung Karno menulis : „Imperialismelah, dan pondorojotnja imperialismelah yang harus kita ingkari, tetapi musuh² imperialisme adalah kawan kita"! Tulis Bung Karno seterusnya : „tidakkah suatu kebaikan, tidakkah suatu kefaedahan, tidakkah suatu k e h a r u s a n yang dimuka persekutuan imperialisme internasional itu, kita hadapkan pula persekutuan bangsa² yang masing² djuga melawan imperialisme internasional itu? Tidakkah dus didalam hakekatnja suatu pengchianatan kepada kitapunja 'groote zaak', djikalau kita dimukanja persekutuan imperialisme ini mau berpolitik politiknja katak dibawah tempurung?" Hal yang mentjerminkan ide internasionalisme Presiden Sukarno inipun lebih² lagi pentingnja disedari, karena kita, seperti dikatakan oleh Pidato PBB Presiden, berkewadjaan „Membangun dunia kembali", mentjapai suatu dunia tanpa imperialisme.

Kedewasaan kita diukur dari tjara pendekatan, tjara pemahaman dan tjara pemetjahan terhadap segala persoalan. Manipol dan perperintjiannja, memberikan kepada kita sekalian dewasa ini suatu pegangan yang sebaik²nja untuk mendekati soal², memahami soal², memetjahkan soal². Oleh sebab itu kedewasaan Republik

kita akan diukur dari tepat-tidaknya ia *melaksanakan* Manipol. Untuk waktu² sesudah sidang pertama MPRS ini, soal yang sangat penting, yang menentukan adalah soal *pelaksanaan* dan soal *pelaksana*². Bukankah Presiden Sukarno sering berkata : akhirnya manusialah yang menentukan !

Belum pernah persatuan nasional dinegeri kita seluas dan sebaik sekarang. Persatuan nasional, yang pada pokoknya — semua kekuatan Republikan ber-sama², bahu-membahu, tanpa kaum reaksioner, bahkan melawan kaum reaksioner. Hanya ada dua kemungkinan bagi persatuan ini : berhasil atau gagal. Sekalipun, revolusi akan berdjalan terus, lepas dari berhasil-tidaknya persatuan yang sekarang ini. Tetapi selama setahun lebih sedjak Manipol ini, sudah ternjata kita tidak hanya mendjumpai bajangan², tetapi djuga tjahaja². Djika rentjana Ketetapan tentang Garis² Besar daripada Haluan Negara yang disusun oleh Komisi Manipol dan sudah disetujui oleh pimpinan MPRS ini kita terima dengan suara bulat dan hati bulat, ini berarti terbitnja tjahaja yang hebat, tjahaja persatuan segenap kekuatan nasional, dengan Nasakom sebagai porosnja dan Manipol sebagai landasannya, tjahaja yang akan menerangi djalannya Republik kita, djalannya Kemerdekaan Nasional dan Demokrasi yang dengan melikwidasi ekonomi kolonial dan keterbelakangan feodal, seperti dikatakan Presiden Sukarno dalam „Amanat Pembangunan”nja, „setelah beberapa kali pembangunan semesta berentjana berdjalan, misalnja sesudah lima atau enam kali, maka hendaknja..... telah memasuki atau minimal mendekati masyarakat adil dan makmur”.

Mari kita kembangkan tjahaja, agar terusir segala kegelapan !

Sekian saudara Ketua dan Madjelis yang mulia, terimakasih atas perhatian saudara².

Ir. Sakirman

Sjarat² pokok pelaksanaan pembangunan

Saudara Ketua dan Pimpinan yang terhormat,
Rapat yang mulia,

Beberapa waktu yang lalu Sidang pertama MPRS kita ini telah mentjatat suatu hasil gemilang dan bersejarah berupa „Ketetapan MPRS No. I Tentang Manipol Sebagai Garis Besar Haluan Negara.”

Sekarang MPRS sedang menghadapi saat² yang penting pula, yang akan membuktikan dapat atau tidaknja MPRS memenuhi harapan PJM Presiden Sukarno dan harapan² massa Rakjat, yaitu Menetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan yang harus sesuai dengan Garis² Besar Haluan Pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Sukarno dan sudah diterima oleh MPRS. Saya yakin dan pertjaja sepenuhnya bahwa MPRS tidak akan mengetjewakan harapan² itu. Sebagai wakil golongan Komunis, dengan ini saja menjatakan dapat menjetudjui pada umumnya „Rantjangan Ketetapan II MPRS Tentang Garis² Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana” ini, yang dalam tempo beberapa hari sджа sudah dapat kita selesaikan berkat semangat gotongrojong dan kebidaksanaan Pimpinan MPRS, berkat keaktifan yang luarbiasa daripada Komisi² dan Sub²-Komisi, berkat kerdjasama yang baik antara semua golongan² dan kelompok² dalam MPRS. Semuanya ini adalah sukses dari prinsip kegotongrojongan yang djudjur dan ichlas.

Atas ini semua saja menatakan djuga terimakasih dan penghargaan saja dan golongan saja jang se-tinggi²nja kepada semua jang telah ambil bagian dalam pekerdjaan besar ini.

Masalah pembangunan sebetulnja bukanlah suatu masalah baru bagi kita. Terutama semendjak tertjapai-nya persetudjuan KMB, golongan² jang berkuasa se-nantiasa mentjoba untuk memetjahkan masalah pem-bangunan menurut konsepsi mereka masing². Akan tetapi usaha itu ternjata gagal, sehingga keadaan eko-nomi Indonesia sekarang belum djuga menundjukkan kemajuan² jang berarti dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun jang lalu. Rakjat banjak, terutama kaum buruh dan kaum tani dan golongan produsen ketjil masih tetap meringkuk dibawah penghisapan kaum monopoli asing dan tuantanah, dan oleh karena itu beban hidup mereka se-hari² adalah sangat berat, dajabeli mereka semakin merosot dan bersamaan de-ngan itu harga² barang² kebutuhan pokok se-hari² se-makin membubung tinggi dan padjak² langsung atau tidaklangsung semakin bertambah berat. Diatas tum-pukan derita Rakjat itu bertachtalah segundukan ketjil oknum² jang sudah menikmati hidupnja, dan jang me-nurut istilah Presiden Sukarno — sudah „binnen” ke-kajaannja, karena telah berhasil „membangun ekonomi-nja diri-sendiri” atas kerugian negara dan Rakjat atau telah berhasil melajani kebutuhan dan kepentingan² „pembangunan” ekonomi modal besar asing.

Dalam hubungan ini saja atasnama golongan Komu-nis menatakan penghargaan kami jang wadjar atas kebidjaksanaan Presiden Sukarno jang telah berhasil menjusun suatu dokumen penting, jaitu *Garis² Besar Haluan Pembangunan seperti jang telah diamanatkan kepada Sidang Pleno DEPERNAS tanggal 28 Agus-tus 1959*.

Dalam amanat ini jang terkenal dengan Amanat Presiden Tentang Pembangunan Semesta Berentjana atau disingkat Amanat Pembangunan Presiden (APP),

dinjatakan setjara ringkas tudjuan pembangunan dalam hubungan dengan tudjuan djangka djauh Revolusi Agustus 1945. Jaitu membentuk negara Kesatuan Re-publik Indonesia jang meliputi masjarakat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke jang bebas dari peng-hisapan dan penindasan imperialisme, feodalisme dan kolonialisme, menudju tertjapainja masjarakat jang adil dan makmur, tanpa penindasan dan penghisapan, ma-sjarakat sosialis Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam Amanat Pembangunan Presiden itu djuga di-tundjukkan dengan djelas bahwa garis perdjjuangan untuk mentjapai tudjuan itu jalah pembangunan se-mesta dan berentjana jang ber-tahap² dizaman per-alihan, dengan mengikis dan membinasakan sisa² ekonomi kolonial dan ekonomi feodal untuk meletakkan kemungkinan pembangunan ekonomi nasional jang ber-diri sendiri dan tidak tergantung.

Dan jang tidak kurang pentingnja dari ini semua jalah keterangan jang dibeberkan dalam APP itu ten-tang sebab² pokok mengapa usaha pembangunan dimasa jang lampau itu selalu menemui kegagalan. Dalam ke-terangan itu terutama ditekankan peranan jang djahat dari kaum imperialis asing jang selalu berusaha turut tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri negara² se-tengah-djadjahan dan negara² jang baru merdeka, APP al. menjatakan : „Sesudahnja selesai perang dunia ke-dua, maka timbullah dua ‘matjam stabilisasi’ didunia ini, jaitu stabilisasi kapitalisme dan stabilisasi Sosialisme. Ketenangan jang ditimbulkan oleh stabilisasi ini hanja untuk sementara sadja, karena kedua belah fihak selalu bertentangan satusamalain. Kalau stabilisasi jang di-tudjukan untuk kepentingan finans-kapital mengandung pertentangan-pertentangan diantara sesama negara-negara imperialis dan diantara negara-negara impe-rialis dengan Rakjat² djadjahan, maka stabilisasi So-sialisme mengandung konsolidasi kedalam dan keluar.

Untuk menghadapi stabilisasi Sosialisme ini, maka negara² imperialis dengan berbagai matjam djalan berusaha mempengaruhi negara² setengah-djadjahan dan yang baru merdeka, terutama dengan menanam modal monopolinja dan mengikatnja dengan pakta² militer yang tidak boleh tidak menimbulkan kerugian besar di pihak negara setengah-djadjahan atau yang baru mendapatkan kemerdekaannya itu. Timbullah kekatjauan dibidang ekonomi, politik dan sosial dan hal ini membawakan kesempatan bagi negara² imperialis untuk mengadakan tjampurtangan yang langsung terhadap persoalan² dalam negeri dari negara² tersebut." (Buku I, Djilid 1 halaman 28).

Keterangan yang begitu gamblang dalam APP itu tentang masalah turut tjampurtangannya negara asing dalam urusan dalam negeri negara² setengah-djadjahan dan yang baru merdeka, bukan sadja telah memperkaja pengetahuan kita tentang sebab² kenapa selalu timbul kekatjauan dibidang ekonomi, politik dan sosial di Indonesia, akan tetapi djuga tentang arti sesungguhnya daripada apa yang disebut „perang dingin“, tentang perbedaan pokok antara watak negara² Sosialis dengan watak negara² imperialis dan praktek² negara² imperialis itu di Indonesia. Kalau dulu masih ada orang yang mengira bahwa hanya Belanda sadjalah yang merupakan bahaja imperialis bagi Indonesia, maka sekarang sudah makin mendjadi djelas bahwa imperialisme di Indonesia ialah setiap bentuk investasi modal monopoli asing yang bertjokol di Indonesia. Pengalaman² di Kuba, Venezuela, Laos, Irak, Libanon, Mesir, Kongo, dll. membuktikan kebenaran hal ini.

Ini perlu saja kemukakan, karena dalam menindjau Rantjangan Pola Pembangunan DEPERNAS setjara pokok, adalah penting sekali diketahui sampai dimana Rantjangan itu telah bisa memenuhi sjarat anti-imperialisme, disamping sjarat anti-feodalisme, guna menjawab pertanjaan apakah Rantjangan Pola Pempa-

ngunan DEPERNAS sudah dapat menggunakan pengalaman yang lampau itu sebagai peladjaran yang berguna bagi suksesnja pembangunan dikemudian hari.

Pada kesempatan ini saja ingin mengemukakan pendapat golongan Komunis bahwa Rantjangan Pola Pembangunan DEPERNAS kurang berwatak anti-imperialisme dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Malahan sementara orang telah berhasil menjelibkan pengertian tentang bentuk baru investasi modal asing jaitu „production share“, „Argentine Pattern“, „joint venture“, „joint enterprise“, dll. se-olah² bentuk ini bukanlah suatu bentuk investasi modal asing. Tepat sekali kesimpulan Komisi Keuangan dan Pembeayaan yang menyatakan bahwa Projek B terlalu menggantungkan pelaksanaannya kepada eksploitasi oleh modal asing.

Jang mendjadi tjiri pokok daripada modal imperialis bukanlah bentuk formilnja, akan tetapi adalah hakekat daripada modal imperialis itu yang menghisap Rakjat dan kekajaan alam Indonesia serta mengalirkan setiap tahunnja keuntungan yang ber-limpah² ke-negara² mereka. *Eksploitasi „production share“ yang berlangsung untuk waktu yang tidak terbatas adalah tidak kurang kedjamnja dibandingkan dengan eksploitasi penanaman modal asing setjara klasik, dan begitupun halnja dengan „Argentine Pattern“, „joint venture“, dan „joint enterprise“.* Djelaslah, bahwa „risiko“ daripada „production share“ adalah sangat besar dan prinsipiil, karena — dengan mengikuti angka² tentang sumber pembiayaan dilapangan pertambangan minyak dalam Buku I, Djilid III, halaman 650, — setelah tahun ke-enam, akan mengalir extra profit yang me-limpah² keluarnegeri, yang tidak kurang besarnya dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari investasi bentuk klasik. „Production share“ adalah sangat merugikan Rakjat Indonesia, *ketjuali djika „production share“ itu merupakan bentuk kredit yang dibayar dengan hasil produksi, yang berbunga rendah, tanpa sjarat² yang mengikat se-*

perti jang dinjatakan dalam Amanat Pembangunan Presiden (Buku I, Djilid I halaman 29 dan 35).

Berhubung dengan itu, sebetulnja adalah lebih tepat, apabila MPRS mengambil keputusan tentang masalah penggunaan modal asing itu sbb. : menolak dengan tegas penanaman modal asing baru, menerima bantuan modal monopoli asing jang sudah ada, menerima bantuan modal luarnegeri dalam bentuk pindjaman tanpa sjarat² politik dan militer dan menjerahkan kepada kebidjaksanaan PJM Presiden dan DPR-GR penggunaan modal luarnegeri jang baru dalam bentuk² lainnja.

Mengenai sifat anti-feodalisme daripada Rantjangan Pola DEPERNAS sesudah disempurnakan oleh Komisi² MPRS jang bersangkutan dapat dikatakan memenuhi sjarat² minimum, asalkan dilaksanakan dengan konsekwen, sembojan „Tanah untuk kaum tani jang menggarap tanah”.

Sampailah saja sekarang kepada soal² jang tidak kurang pentingnja daripada soal² perentjanaan, jaitu soal² jang berhubungan dengan sjarat² pelaksanaan Pola Pembangunan. Masalah pelaksanaan ini adalah suatu masalah jang penting dan vital, sebab, betapapun baiknja sesuatu rentjana diatas kertas, namun ia akan tetap tinggal rentjana sadja djika tidak diikuti oleh tindakan² pelaksanaan jang demokratis dan revolusioner. Lebih² djika rentjana itu an sich mengandung kelemahan² dan kekurangan².

Per-tama² harus djelas bagi kita bahwa sasaran pokok daripada pembangunan tahap I ini ialah mempersiapkan dasar² untuk membangun ekonomi nasional jang berdiri sendiri dan tidak tergantung, dengan mengikis dan membinasakan sisa² ekonomi kolonial dan ekonomi feodal. Untuk ini maka dalam 3-4 tahun jang akan datang ini, seharusnja dilakukan politik perubahan agraria atau „landreform” setjara konsekwen jaitu melaksanakan sembojan „tanah untuk kaum tani jang menggarap tanah”, supaja hasil produksi pertanian

meningkat, supaja kaum tani memiliki dajabeli jang lumayan dan dengan demikian terbentuk pasaran bagi barang² industri kita. Selain landreform, djuga persiapan² pembangunan industri sebagai langkah pertama untuk dalam tahun² kemudian melakukan industrialisasi, dengan industri berat dan industri² vital lainnja, sebagai sektor ekonomi negara jang mempunjai posisi komando atas perkembangan kehidupan ekonomi seluruh negeri.

Bersamaan dengan usaha melaksanakan „landreform” setjara konsekwen itu, perlu diambil tindakan² untuk menggerowoti kekuasaan modal besar asing bukan Belanda jang sudah ada, jaitu CALTEX dan STANVAC, dan perusahaan² perkebunan modern; menasionalisasi semua modal Belanda jang masih ada di Indonesia. Dengan tindakan² ini maka akan dapat dilakukan politik moneter jang stabil guna mendjamin kelantaran produksi, perdagangan dan peredaran uang setjara berentjana, sehingga dapat ditjegah merosotnja dajabeli Rakjat dan merosotnja nilai rupiah kita.

Faktor lainnja jang sangat penting untuk mendjamin sukses dan lantjarnya pembangunan ialah faktor turutsertanja massa Rakjat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dalam berbagai matjam bentuk. Dengan perantaraan wakil²nja, Rakjat sekarang sudah turutserta dalam usaha memberikan nasehat² kepada PJM Presiden, lewat DPA; dalam pekerdjaan legislatif lewat DPR-GR, dalam pekerdjaan membuat rantjangan pola pembangunan lewat DEPERNAS, dan dalam usaha menentukan garis² besar haluan negara dan garis² besar pola pembangunan lewat MPRS. Berkat dilaksanakannja prinsip kegotongrojongan, jaitu prinsip kerdjasama semua tenaga² revolusioner, dengan NASAKOM sebagai porosnja tanpa mengurangi arti golongan² revolusioner lainnja, maka badan² tersebut sampai sekarang telah membuktikan hasil² jang tidak mengetjewakan.

Mudah dimengerti, bahwa turutsertanja wakil² Rakjat dalam pembangunan semesta berentjana adalah tidak tjukup lewat badan² itu sadja. Sebab dengan tidak mengurangi wewenang MPRS, DPA, DPR-GR dan DEPERNAS, maka jang terpenting bagi Rakjat sekarang adalah masalah kekuasaan politik gotong-rojong jang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme, jang bidjaksana, flexible dan tangkas.

Tanpa adanja kekuasaan politik jang demikian ini, maka tidak akan mungkin melaksanakan pembangunan semesta dan berentjana jang dapat memenuhi sjarat² dalam Manipol dan perintjiannja serta APP. Kita harus beladjar dari pengalaman² jang lampau, bahwa pembangunan jang tidak tegas² anti-imperialisme dan anti-feodalisme akan hanja berakibat menumpuknja keajaan Indonesia pada segelintir kaum kapitalis besar asing, dan golongan ketjil oknum² jang oleh Presiden Sukarno dalam Amanatnja tanggal 27 Djanuari 1960 di Istana Negara disebut sebagai „pentjoleng², koruptor, ketidak-tegasan etc, etc, disemua bidang, daripada bidang sivil sampai kebidang militer” (Brosur DJAREK, halaman 31).

Adalah sangat tidak logis dan tidak masukakal, apabila NASAKOM jang sudah diterima untuk MPRS, DPA, DPR-GR dan DEPERNAS, masih djuga disangsikan untuk diterima dalam badan kekuasaan eksekutif didaerah dan dipusat. Lebih² djika diingat bahwa MPRS, Badan² Eksekutif, DPA, DPR-GR dan DEPERNAS adalah semuanya, seperti dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam Sidang Pembukaan DPR-GR tanggal 16 Agustus jang lalu, merupakan alat Revolusi jang sama pentingnja dan mendjalankan tugas jang satu dan sama pula jaitu menyelesaikan Revolusi Agustus 1945 jang belum selesai ini.

Dilihat dari sudut dasar Negara Pantjasila jang berarti menurut keterangan Bung Karno dalam „Lahirnja Pantjasila”, djika diperas, mendjadi Trisila, dan djika

diperas lagi mendjadi Ekasila atau Gotongrojong, djuga tidak ada alasan samasekali untuk mendiskriminasikan kekuatan² demokratis dan revolusioner dengan NASAKOM sebagai porosnja dalam hubungan dengan pembentukan semua badan eksekutif. Sebab, kata Presiden Sukarno dalam pidatonja didepan rapat raksasa di Surabaja tanggal 30 Oktober jang lalu : „..... Kalau Pantjasila tulen harus setudju NASAKOM”.

Dan selandjutnja, dalam Amanatnja „DJAREK”, tanggal 17 Agustus 1960 Presiden mengatakan : „Dan kita ingin menang. Dan kita toh harus menang? Karena itu saja selalu mengandjurkan Gotongrojong djuga dilapangan politik. Karena itu Manifesto Politik — USDEK bersemangat kegotongrojongan-bulat, djuga dilapangan politik. Karena itu di Solo beberapa hari jang lalu, saja tegaskan perlunja persatuan dan kegotongrojongan antara golongan² Islam, Nasionalis dan Komunis. Ini adalah konsekweni politik terpenting bagi semua pendukung Manifesto Politik dan USDEK, suatu konsekweni politik jang tidak plintat-plintut dan plungkar-plungker bagi semua orang jang setia pada Revolusi Agustus 1945.

Djika tidak, maka semua omongan tentang Gotongrojong, Manifesto Politik, USDEK, Front Nasional, 'setia kepada Revolusi Agustus 1945', dan lain sebagainya adalah omongkosong, 'lipservice' belaka.

Salahsatu tjiri daripada orang jang betul² revolusioner adalah satunja kata² dengan tindakan. Orang revolusioner jang tidak bersatu dalam kata² dan perbuatan adalah orang revolusioner gadungan”. (Brosur DJAREK, halaman 27).

Marilah kita selandjutnja dengan penuh kedjudjuran dan bebas dari perasaan purbasangka, merenungkan djiwa dan semangat daripada suatu bagian jang sangat penting daripada Amanat Presiden Tentang Pembangunan tanggal 28 Agustus 1959 : „Dalam bidang politik, Rakjat Indonesia tidak bosan² terusmenerus meng-

usahakan penggalangan persatuan nasional; Rakjat Indonesia sekarang harus menjiapkan diri untuk melaksanakan ide demokrasi terpimpin sebagai pelaksanaan Konsepsi Presiden yang ditjetuskan pada tanggal 21 Februari 1957". (Djilid I, halaman 57).

Dan apakah sebenarnya isi daripada Konsepsi Presiden yang sudah sangat terkenal itu? Isinja jalah tidak-lain daripada pembentukan suatu Kabinet Gotongrojong yang didalamnya duduk wakil partai² dan fraksi² dalam Parlemen yang tjukup mempunyai kiskosen, dan pembentukan Dewan Nasional, yang sekarang sudah mendjelma mendjadi Dewan Pertimbangan Agung.

— Saudara Ketua, dan Pimpinan yang terhormat.

Saja kemukakan semuanya ini, chususnja tentang soal badan eksekutif Gotongrojong ini, adalah se-mata² karena kami ingin Pola Pembangunan tahapan I ini dapat dilaksanakan. Tanpa persatuan nasional yang kuat, tanpa Gotongrojong yang sungguh², tidak ada soal penting dan pokok bisa dipetjahkan dinegeri kita.

Saja kira tidak ada seorangpun diantara kita ini yang suka diberi predikat „revolusioner gadungan“, lebih² karena kita tahu, bahwa kita semua ini telah ditempatkan disini sebagai „putera² dan puteri² yang terbaik“ daripada seluruh bangsa dan tanahair Indonesia.

Oleh karena itu agar kita tidak mendapat gelar revolusioner gadungan, dan agar kita bisa membuktikan bahwa kita memang satu dalam kata² dan tindakan, dan membuktikan bahwa kita benar² adalah putera² dan puteri² Indonesia yang terbaik, maka sejogianja Amanat Pembangunan Presiden itu, kita laksanakan dengan lapang dada, didjiwai semangat gotongrojong yang murni, semangat mempersatukan atau „samenbundelen“, semua kekuatan² revolusioner disemua bidang pembangunan dan Revolusi, tanpa mendiskriminasi bidang yang satu terhadap bidang yang lain. „Samenbundeling“ daripada semua kekuatan² revolusioner, ketjuali harus dihimpun dalam badan², dan

alat² kekuasaan negara sebagai dikatakan oleh PJM Presiden Sukarno dalam Manipol, Amanat „Djalannja Revolusi Kita“ dan Amanat Pembangunan Presiden (APP), djuga harus dihimpun dalam front persatuan nasional yang demokratis dan anti-imperialisme. Pendirian Presiden Sukarno ini, adalah tepat sekali. Sebab ibarat orang harus berdjalan dengan dua kaki, maka Revolusi seharusnya djuga „berdjalan dengan dua kaki“, kaki yang satu jalah badan² dan alat² kekuasaan negara, dan kaki lainnja jalah front persatuan nasional yang mendjadi transmisi atau heffboom antara Kepala Negara dan masjarakat. Tanpa adanja „dua kaki yang dibangun menurut prinsip kegotongrojongan berporoskan NASAKOM“, tidaklah mungkin Revolusi Agustus 1945 diselesaikan dengan sukses.

Front Nasional sebagai sjarat mutlak untuk dapat membikin suksesnja pembangunan dan suksesnja penyelesaian Revolusi Agustus 1945, barulah bisa dikatakan dapat memenuhi tugasnja apabila mampu mendjalankan aksi² massa revolusioner, untuk mentjapai sasaran² pembangunan Revolusi setjara tepat. Akan tetapi aksi² ini baru dapat diadakan, apabila Rakjat dapat berkumpul dan berapat untuk mempersatukan pendapat dan pikirannja tentang pelaksanaan daripada soal² pokok Revolusi dan Pembangunan seperti yang diuraikan dalam Manipol dan perintjiannja serta Amanat Pembangunan Presiden (APP). Tanpa adanja kesempatan bagi Rakjat untuk membitjarakan dan mendiskusikan masalah² pokok Revolusi dan Pembangunan, tidaklah mungkin Rakjat melakukan kesatuan tindakan², atau kesatuan aksi² revolusioner.

Oleh karena itu sjarat yang mutlak bagi perkembangan gerakan front persatuan nasional adalah terdjaminnja hak² demokratis dan kebebasan² Rakjat. Sudah tentu di-daerah² yang belum aman sepenuhnya, pelaksanaan hak² dan kebebasan demokratis ini harus diatur dengan suatu kebidjaksanaan yang khusus, se-

suai dengan keadaan setempat. Dan sudah terang djuga bahwa musuh² revolusi, golongan² kepalabatu jang menentang Manipol dan garis² besar haluan pembangunan, termasuk surat kabar² jang mendjadi terompot mereka itu, harus ditjabut hak²nja untuk merusak fikiran dan persatuan Rakjat.

Dengan mendjamin hak² serta kebebasan demokratis Rakjat, dan terbentuknja suatu front persatuan nasional jang luas dan kuat, maka akan terbukalah djuga kemungkinan² bagi Rakjat untuk melakukan pengawasan terbuka atas djalannja pelaksanaan pembangunan, dengan memberikan kritik² jang konstruktif setjara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hubungan ini, maka sebetulnja sudah pada tempatnja apabila saja atasnama golongan Komunis mengadakan pertimbangan kepada Peperti mengenai penindjauan berlakunja Undang² Keadaan Bahaja supaya disesuaikan dengan keadaan setelah dimulai pelaksanaan pembangunan semesta berentjana ini. Hanja Rakjat jang tidak tertekan perasaan dan fikirannja bisa berbuat banjak untuk melaksanakan ketetapan² jang sudah diambil oleh MP RS.

Demikianlah, sjarat² pokok pelaksanaan pembangunan untuk mentjegah agar tudjuan pembangunan dan perspektif Revolusi Agustus, jaitu pembentukan masyarakat sosialis Indonesia, tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, dapat dibelokkan mendjadi „sosialisme” dengan penghisapan dan penindasan oleh kaum imperialis asing dan tuantanah.

Sekali lagi saja njatakan, bahwa golongan Komunis menerima Ketetapan MP RS tentang Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969.

Njono

Soal kesedjahteraan dalam Sidang MP RS

Sidang MP RS jang mulia,

Setelah mempeladjar Rantjangan Ketetapan MP RS No. II, khusus mengenai bagian ketentuan umum bidang kesedjahteraan beserta lampiran²nja, selaku Ketua Komisi „B” (Bidang Kesedjahteraan) dapatlah saja melaporkan, bahwa Rantjangan Ketetapan MP RS No. II itu adalah sesuai dengan perasaan², fikiran² dan perumusan² pendapat Komisi „B”.

Komisi „B” jang beranggotakan 60 orang terbagi atas 4 sub² Komisi, jaitu Sub Komisi Kesehatan jang diketuai oleh Kolonel Dr. Wonojudo dengan 2 orang Wakil Ketua, Sub Komisi Perumahan jang diketuai oleh Prof. Dr. N. Drijarkara dengan 2 orang Wakil Ketua, Sub Komisi Kesedjahteraan Sosial jang diketuai oleh R. Z. Fananie dengan 3 orang Wakil Ketua dan Sub Komisi Kesedjahteraan Buruh, Tani dan Nelajan jang diketuai oleh Sudarsono dengan 2 orang Wakil Ketua.

Permusjawaratan dalam rapat² Komisi dan Sub² Komisi jang dilangsungkan sedjak tanggal 16 s/d 25 November 1960 selalu diliputi oleh suasana gembira, bersatu dan penuh dengan semangat bekerdja tjepat, tidak tele², tetapi tidak serampangan. Suasana pimpinan adalah kompak dan semua hasil² Komisi diputuskan dengan musjawarah dan suara bulat.

Hasil² pokok Komisi „B” jalah berupa Perumusan Pendapat Komisi „B” tentang Garis² Besar Pema-

ngunan Bidang Kesedjahteraan Rakjat. Dalam Perumusan Pendapat Komisi „B” ini diputuskan :

1. Menjetudjui pada umumnja Garis Besar Pembangunan Bidang Kesedjahteraan Rakjat sebagaimana tersebut dalam Rantjangan Dasar Undang² Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, Buku ke-Satu, Djilid III, dengan memadjukan saran² jang bersifat penambahan atau pengurangan, dan

2. Menjerahkan pelaksanaannja dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dengan dimana perlu membawanja ke Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Sesuai dengan petundjuk terachir Pimpinan MPRS, maka saran² jang telah diputuskan dengan suara bulat oleh Komisi „B” telah di-bagi² oleh Pimpinan Komisi dalam Lampiran² A dan B, tanpa Lampiran C.

Mengenai pengertian umum kesedjahteraan Rakjat, Komisi „B” berpendapat, bahwa Rakjat dapat disebut sedjahtera, apabila Rakjat tidak hanya terdjamin mendapatkan pekerdjaan sesuai dengan bakatnja dan memperoleh hasil pekerdjaan jang lajak guna memenuhi keperluan hidup se-hari² bagi dirinja sendiri beserta keluarga, tetapi djuga harus mendapatkan djaminan hari tua, sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan, djika tak berdaja lagi untuk mentjari nafkahnja.

Bidang Kesedjahteraan meliputi bidang² kesehatan, perumahan beserta air minum dan penerangannja, kesedjahteraan sosial dan kesedjahteraan buruh, pegawai, tani dan nelajan.

Dibidang kesehatan, Komisi „B” berpendapat, bahwa dalam pendidikan tenaga kesehatan, supaja disamping pendidikan para dokter, dalam waktu jang singkat diutamakan pendidikan para-medisch jang selekasnja dapat dikerdjakan di-pelosok². Masalah² lain jang dianggap penting oleh Komisi „B” ialah masalah penggunaan dan penjebaran tenaga kesehatan pemerintah maupun

swasta setjara adil dan merata dan masalah obat²an supaja mudah didapat dengan harga murah.

Dibidang perumahan, Komisi „B” menegaskan, bahwa dalam soal perumahan keaktifan Pemerintah hendaknja djanganlah hanya berupa pemberian fasilitas, melainkan Pemerintah hendaknja djuga membangun rumah², baik untuk disewakan maupun untuk didjual, terutama di-tempat² industri negara. Selandjutnja di-kemukakan, supaja bantuan² untuk pembangunan perumahan disalurkan melalui berbagai djalan dengan tjara² jang mudah, misalnja melalui koperasi pembangunan perumahan, djawatan perumahan Rakjat, bank perumahan, usaha swasta nasional dllnja.

Mengenai penerangan, Komisi „B” menjetudjui usaha perluasan elektrifikasi oleh negara. Tetapi disamping itu, supaja distribusi minjak tanah diusahakan setjara merata, tjepat dan murah.

Dibidang kesedjahteraan sosial, Komisi „B” memajukan satu prinsip, supaja usaha² kesedjahteraan sosial oleh Pemerintah diperluas, disamping itu hendaknja Pemerintah membantu pembangunan usaha² swasta nasional, baik jang sudah ada, maupun jang akan didirikan dalam bidang kesedjahteraan sosial. Untuk mentjegah timbulnja dan mendjalarnja penjakit masjarakat, supaja Pemerintah melarang dengan perundangan pengemisan, pelatjuran, perdjudian, pemadatan, perdagangan manusia, penghisapan wuker dan pergelandangan.

Dibidang kesedjahteraan buruh dan pegawai, Komisi „B” memusatkan perhatiannja kepada adanja satu undang² pokok kepegawaian/perburuhan jang antara lain menghapuskan undang² kolonial jang masih ada seperti onslagrecht no. 396/1941, menetapkan adanja satu status pegawai negeri, menghapuskan diskriminasi lapangan perupahan, sjarat² kerdja dan djaminan sosial dan adanja perlindungan khusus bagi buruh wanita dan buruh muda.

Dibidang kesedjahteraan tani dan nelajan, Komisi

„B” menekankan pentingnja pelaksanaan per-undang-
an jang telah ada untuk memperbaiki tingkathidup kaum
tani, diantaranya pelaksanaan Undang² Pokok Agraria,
Undang² Bagi Hasil, Undang² penghapusan tanah par-
tikelir, disamping itu supaya dilakukan perbaikan² dila-
pangan pengkreditan, diadakan pelarangan/pengawas-
an se-keras²nja terhadap woeker dllnja. Khusus untuk
nelajan, Komisi „B” memandang perlu adanya undang²
bagi hasil bagi nelajan.

Sidang MPRS jang mulia,
Demikian beberapa masalah pokok jang dibahas
dalam bidang kesedjahteraan untuk sekedar memberi-
kan gambaran perasaan², fikiran² dan perumusan² pen-
dapat apa jang hidup dikalangan Komisi „B” jang ter-
njata sudah tertjermin setjara pokok dan lengkap dalam
Rantjangan Ketetapan MPRS No. II jang diadjukan
oleh Pimpinan MPRS kepada kita semua.

Saja harapkan, semangat persatuan nasional jang saja
alami langsung di Komisi „B” dan dalam permusjawa-
ran² MPRS lainnja dapat terus berlangsung tidak
hanja didalam gedung MPRS disini, djuga diluar ge-
dung MPRS dalam melaksanakan ketetapan² MPRS
jang kita putusan bersama dengan musjawarah dan
suara bulat.

Terimakasih.

Asmu

Landreform dan industrialisasi adalah loro-loroning atunggal

Saudara Ketua Jth.

Sidang Madjelis Jang Mulia,

Atasnama kaum tani jang saja wakili, saja memper-
kuat penerimaan setjara aklamasi Madjelis Permusja-
waratan Rakjat Sementara terhadap Ketetapan No.
II/MPRS/1960 Tentang Garis² Besar Pola Pempa-
ngunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Per-
tama 1961-1969.

Ketetapan No. II ini meletakkan kewadajiban pada
Pemerintah untuk melaksanakan kebedjaksanaan politik
diberbagai bidang sesuai dengan Garis² Besar Pola
Pembangunan Nasional Semesta Berentjana ketetapan
MPRS. Ketetapan No. II ini merupakan pedoman bagi
Presiden/Perdana Menteri dan Rakjat Indonesia untuk
mengkadji seseorang Menteri pembantu Presiden dan
pedjabat lainnja dipusat dan didaerah tentang kesetia-
annja terhadap revolusi, negara dan Rakjat serta ke-
tjakaan bekerdjanja.

Dalam Ketetapan No. II ditegaskan bahwa Pempa-
ngunan Nasional Semesta Berentjana ini adalah suatu
pembangunan dalam masa peralihan jang ber-
sifat menjeluruh untuk tertjapainja masyarakat sosialis
Indonesia, dimana tidak terdapat penindasan atau peng-
hisapan atas manusia oleh manusia. Ini berarti bahwa
sedjak dimulainja pelaksanaan pembangunan sudah

harus dirintis djalán pembebasan bagi bagian terbesar Rakjat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani, jang sampai pada saat ini masih mengalami ber-bagai² bentuk penindasan dan penghisapan.

Saja menjambut dengan gembira ketetapan jang men-jatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan nasional berentjana ini per-tama² harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerah-kan semua modal dan potensi (funds and forces) jang progresif, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban Rakjat, tanpa mentjantumkan perlunja penanam-an modal asing. Penanaman modal asing, dalam bentuk apapun djuga, apabila ia mendjalankan transfer ke-untungan, akan berarti pemerasan terhadap keringat Rakjat dan kekayaan nasional negeri kita untuk kepen-tingan asing.

Ketetapan No. II ini menundjukkan djalán pema-ngunan nasional semesta setjara tepat. Terutama ka-rena menetapkan bahwa „Landreform adalah bagian mutlak daripada revolusi Indonesia dan basis pema-ngunan semesta”. Dan selandjutnja menetapkan bahwa „tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan”.

Ini adalah sesuai dengan amanat PJM Presiden Su-karno jang selandjutnja menegaskan bahwa „Tanah Untuk Tani”. „Tanah Untuk Mereka Jang Betul² Menggarap Tanah” („Djarek” halaman 35). Dengan melaksanakan landreform berdasar prinsip² jang di-amanatkan oleh PJM Presiden Sukarno, akan tertijpta-lah sjarat² untuk membangkitkan kegairahan bekerdja kaum tani. Akan terdapatlah sjarat² untuk meningkat-kan produksi pertanian, terutama produksi pangan jang sekaligus meningkatkan dajabeli kaum tani jang me-rupakan konsumen terbesar dinegeri kita. Ini semua akan membuka djalán guna meningkatkan taraf kebu-dajaan dan dajatjipta kaum tani, sehingga masyarakat kita sanggup memikul tugas mengembangkan industri

dinegeri kita. Dengan melaksanakan landreform berda-sarkan prinsip² jang diamanatkan oleh Presiden Su-karno, terbuka djalán untuk mengembangkan industri dinegeri kita. Tanpa landreform sematjam itu, tidak mungkin dilaksanakan pembangunan industri dinegeri kita. Sama halnja dengan revolusi tidak dapat menang tanpa kaum tani. Tepat sekali pernjjataan Presiden Su-karno jang menandakan bahwa „Gembar-gembor ten-tang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakjat, tanpa me-laksanakan Landreform, adalah gembar-gembornja tu-kang pendjual obat dipasar Tanahabang atau di Pasar Senen”. („Djarek” halaman 34). Selandjutnja untuk memenuhi kebutuhan kaum tani dan Rakjat pada umum-nja diperlukan industrialisasi. Landreform dan indus-trialisasi satu sama lain tidak dapat di-pisah²kan, loro-loroning atunggal.

Saja mengharap agar dalam melaksanakan pema-ngunan nasional semesta berentjana tahapan pertama ini, Pemerintah benar² memegang teguh garis tiga anti, jaitu anti-liberalisme, anti-imperialisme dan anti-feodal-isme, serta melaksanakan landreform dan industrialisasi, sesuai dengan Ketetapan MPRS ini.

Saudara Ketua Jth.

Sidang Madjelis Jang Mulia.

Dalam Ketetapan No. II ini beserta lampirannja telah tjukup dirumuskan prinsip² jang dapat meringankan beban penghidupan serta projek² jang dapat memenuhi kebutuhan jang paling mendesak dari massa Rakjat, ter-masuk kaum tani. Pelaksanaan prinsip² dan projek² itu akan sangat membantu Pemerintah dalam mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) dalam-negeri. Pembebasan kaum tani dari penghisapan feodal dan pemberian tanah kepada kaum tani, akan mendo-rong kaum tani mengambil bagian aktif dalam pem-bangunan nasional semesta. Tetapi dengan itu sadja belumlah tjukup. Guna membangkitkan dan mengorga-

nisasi kaum tani untuk setjara sadar mengambil bagian aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional semesta, diperlukan kebebasan² demokratis. Dengan mendjamin bumi (tanah) dan demokrasi, tidak dapat diragukan lagi, Pemerintah akan dapat menarik kaum tani untuk mengambil bagian aktif dan memberikan andil jang tidak terbatas dalam pelaksanaan pembangunan nasional semesta. Tetapi, djika tanpa bumi dan demokrasi bagi kaum tani, kita terpaksa pesimis terhadap pelaksanaan Garis² Besar Pola Pembangunan jang sudah kita terima ini.

Achirnja, Saudara Ketua Jth, saja menjampaikan penghargaan se-besar²nja kepada segenap anggota MPRS Jth, jang telah memenuhi harapan Rakjat jang diamanatkan oleh PJM Presiden dalam pembukaan Sidang MPRS jang pertama ini, bekerdja dengan tjepat dan tepat. Ini adalah berkat kerdjasama jang baik dari segenap kekuatan nasional jang berintikan Nasakom dalam MPRS ini. Saja yakin bahwa djika kerdjasama segenap kekuatan nasional berintikan Nasakom seperti kita saksikan dan alami selama Sidang² MPRS ini diteruskan pada tingkat pelaksanaan Garis² Besar Pola Pembangunan, maka pola pembangunan jang sudah kita terima bersama ini akan benar² mendjadi kenyataan.

Sekian dan terimakasih.

Nursuhud

Perbedaan pokok „Rentjana Pembangunan” PRRI-Permesta dengan Garis² Pola Pembangunan MPRS

Sdr. Ketua dan pimpinan sidang jth, Madjelis jang mulia,

Sebagai seorang jang berasal dari Sumatera dan dari Sumatera Barat pula, jang beberapa tahun jang lalu merupakan pusat pemberontakan, kontra-revolusioner PRRI, maka saja merasa sangat gembira dengan adanya Ketetapan II MPRS ini, jang ketjuali telah menerima Garis² Besar Pola Pembangunan Depernas, djuga telah lebih menjempurnakannya.

Kalau dimasa jang lalu kita telah memberikan djawaban pertama jang tepat terhadap pemberontakan kontra-revolusioner PRRI-Permesta berupa pukulan² politik dan militer jang menghantjurkan, maka Garis Besar Pola Pembangunan jang telah kita sahkan sekarang ini merupakan djawaban kedua jang tepat pula. Saja sepenuhnya membenarkan utjapan Presiden Sukarno dalam „Djalannya Revolusi Kita” jang bunjinja sbb.:

„Bahagialah Rakjat Indonesia, kalau ia nanti dengan diterimanja blueprint Depernas oleh MPRS, telah mempunyai ia punja *Pola Pembangunan Tahapan Pertama*. Bahagialah ia, karena ia, dengan adanya *Pola Pembangunan* itu, merasakan adanya *pimpinan ekonomis*, — merasakan adanya *ekonomisch leiderschap*, disamping

adanya *politiek leiderschap* yang terpantar dalam Manifesto Politik dan Usdek" (hal. 33). Selandjutnja beliau menegaskan: „Berantakanlah nanti zoogenaamd ramalannya PRRI-Permesta yang berbunyi: 'Betul mereka (PRRI-Permesta itu) kalah dibidang militer, tetapi Republiknja Sukarno nanti akan hantjur sendiri karena economic mismanagement and misleadership'. Dengan adanya blueprint Depernas itu maka *ekonomisch leiderschap* akan tergaris njata. Dan Insja Allah akan berantakan bukan sadja ramalan kaum pemberontak itu bahwa Kita akan hantjur, tetapi Insja Allah akan berantakan pula mereka punja harapan, bahwa mereka akan tetap berdiri. Insja Allah, bukan Republik Indonesia yang akan hantjur, tetapi PRRI-Permestalah yang akan hantjur”.

Dan saja sendiri memang yakin dan pertjaja bahwa apabila rumus² yang mati diatas kertas sekarang ini dapat direalisasi mendjadi kenyataan² yang hidup dalam kehidupan-njata, maka ia benar² akan merupakan sjarat untuk menghantjurkan pemberontakan kontra-revolusioner itu sampai ke-akar²nja.

Alasan lain yang perlu saja kemukakan disini ialah bahwa untuk kepentingan pemberontakan mereka yang kontra-revolusioner itu, kaum pemberontak dimasa yang lalu telah mengabui mata Rakjat dengan sembojan² kosong tentang „pembangunan semesta”. Akan tetapi Rakjat Sumatera dan luar Djawa pada umumnya akan segera dapat melihat bahwa Garis² Besar Pola Pembangunan kita sekarang ini berbeda didalam watak dan tudjuannya dengan „pembangunan semesta” a la Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda dan dewan² partikelir lainnya. Ia berbeda dalam watak dan tudjuannya, karena „rentjana² pembangunan semesta” a la dewan² partikelir itu bukanlah „rentjana² pembangunan” yang bersifat anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan oleh karena itu tidak bertudjuan untuk melikwidasi ekonomi kolonial dan ekonomi feodal yang masih bertjokol ditanahair kita, melainkan „rentjana² pembangunan”

yang hendak mengundang lebih banjak lagi penanaman modal asing baru dalam bentuk²nja yang klasik maupun dalam bentuk²nja yang baru dan yang hendak terus memupuk tuantanah² bumiputra. Dengan lain perkataan: pembangunan modal „productionshare”, „joint enterprise”, „joint venture”, „Argentine pattern” dan lain² sebagainya. Teranglah bahwa „rentjana² pembangunan” mereka itu bukanlah „rentjana pembangunan” nasional, tetapi „rentjana pembangunan” seperti yang dikatakan Presiden Sukarno berorientasi kepada kepentingan modal asing. Garis² Besar Pola Pembangunan kita sekarang ini adalah rentjana pembangunan yang pada umumnya mempunyai watak anti-imperialisme dan anti-feodalisme, yang membedakan ia dari boleh dikata semua rentjana² pembangunan yang pernah ada dimasa yang lalu.

Watak anti-imperialisme daripada Garis² Besar Pola Pembangunan kita sekarang ini tertjermin dalam beberapa rumus dalam berbagai bidang. Dibidang produksi misalnja dalam Ketetapan II MPRS ini dalam fasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa tjabang² produksi yang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hidup Rakjat banjak, dikuasai oleh Negara, djika perlu dimiliki oleh Negara. Dibidang pembiajaan fasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa sumber pembiajaan bagi pembangunan nasional semesta berentjana itu pertama² harus diusahakan atas kekuatan dalamnegeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) yang progresif, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban Rakjat.

Sangat daripada perumusan ini ialah pertjaja pada kekuatan diri sendiri dan tidak ingin menambah beban Rakjat dalam politik pembangunan kita. Tepat sekali bahwa dalam semua ketetapan MPRS tidak ada ditjantumkan tentang penanaman investasi modal asing. Sebaliknja, didalam MPRS terdapat semangat yang kuat untuk menolak penanaman modal asing baru dan untuk menggerowoti modal asing yang sudah ada, se-

perti mengambil-alih modal Belanda dalam BPM/Shell dan menguasai hasil devisa dari perusahaan minyak untuk dijadikan pindjaman jangka panjang.

Demikian juga pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa jika modal nasional guna pembiayaan pembangunan belum mentjukupi, maka dapat diadakan kerdjasama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luarnegeri, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Manifesto Politik dan APP, dan harus disusun dalam per-undang²an ber-sama² dengan DPR-GR. Ini adalah sepenuhnya sesuai dengan APP yang mengatakan bahwa „pada prinsipnja modal asing dapat diterima hanya sebagai pindjaman” (hal. 29).

Hal² ini perlu saja kemukakan disini mengingat masih bertjokolnja modal monopoli asing di Sumatera dibidang perminjangan, seperti di Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan dan mengingat masih banyak ke-kajaan² yang terpendam dalam buminja yang belum digali. Sebagai terkenal Sumatera adalah pulau emas, tetapi sajang selama ini emasnja terus-menerus dibawa orang keluarnegeri.

Watak anti-feodalisme dari rentjana pembangunan kita sekarang tersimpul antara lain dalam konsiderans ayat 5 yang mengatakan bahwa sjarat pokok untuk pembangunan tata-perekonomian nasional adalah antara lain pembebasan ber-djuta² kaum tani dan Rakjat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan „land-reform” menurut ketentuan² hukum nasional Indonesia, seraja meletakkan dasar² bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh Negara. Selanjutnja pasal 4 ayat (3) mengatakan bahwa landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan. Ketentuan² ini ber-sama² dengan Pola Depernas ditambah dengan penegasan² yang terdapat dalam Lam-

piran A Ketetapan II MPRS, menurut hemat saja, pada pokoknja telah mentjakup pokok² fikiran Presiden Sukarno dalam Manifesto Politik, Djalannja Revolusi Kita dan APP mengenai landreform. Bukankah Presiden Sukarno telah mengatakan bahwa „melaksanakan land-reform berarti melaksanakan satu bagian jang mutlak dari revolusi Indonesia”, dan bahwa „revolusi Indonesia tanpa landreform adalah gedung tanpa alas” (Djalannja Revolusi Kita, hal. 54).

Hal² ini perlu saja kemukakan disini, karena masih ada orang yang beranggapan bahwa didaerah seperti Sumatera Barat tidak terdapat pemilikan tanah setjara feodal dan bahwa disana semua tanah adalah milik kaum. Mungkin orang² ini tidak mengetahui kehidupan kaum tani yang sesungguhnya atau hanya melihat hukum² formil mengenai pertanahan yang masih berlaku. Mereka tidak mengetahui bahwa oleh karena proses perkembangan tenaga² produktif masyarakat hak-milik kaum atas tanah itu telah terpetjah-belah bahwa telah terdjadi pemindahan² milik tanah kaum yang menyebabkan terdapatnja akumulasi tanah kaum lainnja yang telah tumbuh mendjadi tuantanah². Oleh karena itu menurut pendapat saja landreform harus dilaksanakan diseluruh negeri, tidak terketjual Sumatera Barat. Demikianlah perbedaan pokok antara „rentjana² pembangunan” a la PRRI-Permesta dengan Garis² Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana MPRS.

Sdr. Ketua, achirnja saja disini meminta perhatian tentang salahsatu sjarat pula daripada pelaksanaan pola pembangunan ini. Jang saja maksudkan ialah masalah pemulihan keamanan. Sedjak Presiden Sukarno dalam „Djalannja Revolusi Kita” mengumumkan bahwa pemulihan keamanan sudah akan selesai pada pertengahan tahun 1962, maka kami di Sumatera sudah meng-hitung² hari dan me-nanti² dengan penuh harapan saat pertengahan tahun 1962 itu. Djika pada saat itu keamanan masih belum selesai, maka hal itu sudah barangtentu merupakan rintangan jang besar bagi pelaksanaan ren-

tjana pembangunan semesta ini. Oleh karena itu djangka waktu jang telah ditetapkan itu hendaknja benar² dapat dipegang teguh. Dalam hubungan ini ingin saja menekankan sekali lagi tjanang jang dengan keras dilantangkan oleh Manifesto Politik bahwa pemulihan keamanan hanja bisa didjamin penjelesaiannja dalam waktu jang se-singkat²nja, apabila tetap dilaksanakan garis tanpa kompromi dalam bentuk apapun djuga dan garis mengikutsertakan Rakjat.

Karel Supit

Ketetapan² MPRS sendjata baru untuk melawan musuh² Rakjat

Sdr. Ketua jang terhormat,
Sidang Madjelis jang mulia,

Berkat kebidjaksanaan Pimpinan MPRS dan karena ke-sungguh²an bekerdja dari seluruh anggota MPRS jang didjiwai oleh semangat gotongrojong dan semangat musjawarah jang konstruktif, MPRS telah berhasil dengan gemilang menjelesaikan tugasnja mensahkan 2 dokumen penting jang peranan dan pengaruhnja akan sangat menentukan djalannja serta kehidupan Rakjat dan Republik kita di-hari² jang akan datang.

Soalnja sekarang jalah bagaimana sambutan Rakjat di-daerah² terhadap dokumen² tersebut dan bagaimana pelaksanaannja nanti.

Sebagai seorang putera Indonesia jang berasal dari Sulawesi saja dapat menyatakan bahwa dokumen tersebut ditinjau dari sudut politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan tjukup mentjerminkan kepentingan vital dari seluruh Rakjat Indonesia baik setjara Nasional, maupun setjara masing² sukubangsa.

Keputusan² tersebut mentjerminkan hasrat dan kepentingan Rakjat untuk menggalang suatu persatuan nasional jang kuat sebagai sjarat mutlak untuk menjelesaikan Revolusi Agustus sampai tertjapai sepenuhnya satu Republik Indonesia jang merdeka penuh, bersatu,

kuat, demokratis, adil dan makmur sebagai perwujudan amanat penderitaan Rakyat.

Keputusan² tersebut jika dilaksanakan, juga dapat memberikan jalan keluar dan pemertahan bagi kesatuan² Rakyat Sulawesi yang sekarang sudah begitu memuntjak. Keputusan² yang sudah diambil MPRS dapat menjadi landasan yang kuat bagi terwujudnya keinginan Rakyat untuk mendapatkan persatuan, demokrasi, keamanan dan perbaikan nasib.

Oleh karena itu saja yakin pula bahwa keputusan² MPRS yang maha penting ini akan disambut dengan gembira dan penuh harapan oleh sebagian terbesar dari Rakyat Indonesia di Sulawesi. Ini tidak lain karena :

Dengan Ketetapan No. I dan Ketetapan No. II MPRS, Rakyat Indonesia mendapatkan senjata baru untuk melawan musuh² Rakyat dan Republik ialah imperialisme, feodalisme dan kaum pemberontak kontra-revolusioner. Sebelum itu senjata Rakyat satu²nja hanyalah semangat Proklamasi 1945 dan kesetiaan kepada kesatuan bangsa, Tanahair dan Republik Indonesia.

Selama 15 tahun, imperialisme beserta kakitangan²nja telah tidak henti²nja menjadikan Sulawesi sasaran operasi²nja dengan maksud kemudian menghanturkan Republik Indonesia. Kita kenal gerakan Van Mook dengan Twapro serta NIT-nja, kita kenal aksi² Andi Aziz dan Somoukil, kita kenal pemberontakan Kahar Muzakar dengan DI-nja akhirnya kita kenal proklamasi Permesta oleh Sumual dan Saleh Lahade. Benar semua aksi² anti-Republik itu dapat diatasi berkat perjuangan patriotik dari Rakyat Indonesia di Sulawesi dengan bantuan perjuangan heroik seluruh Rakyat Indonesia dan APRI. Tapi dalam pada itu orang ber-tanja², berapa banyak sudah korban dan kerugian yang diderita oleh Rakyat dan Negara, dan kapankah segala kekatjauan dan penderitaan Rakyat akan berakhir.

Dengan adanya Ketetapan MPRS No. I dan No. II itu Rakyat akan dapat dipersendjatai dengan sebuah

konsepsi politik dan sebuah konsepsi pembangunan yang jika benar² dilaksanakan bukan saja akan memberikan pukulan terakhir kepada sisa² pemberontak, tapi juga akan menjadi senjata ampuh ditangan Rakyat untuk melawan segala bentuk penjelewan yang baru.

Rakyat sedjak sekarang akan lebih mampu dan gairah meneruskan tji² revolusi Indonesia karena ia sekarang telah dipersendjatai dengan pengertian² tentang soal² pokok Revolusi Indonesia, Rakyat sekarang sudah bisa mengetahui dengan jelas dasar² tujuan dan kewajiban Revolusi Indonesia, tentang kekuatan² sosial Revolusi Indonesia, tentang sifat Revolusi Indonesia, tentang haridepan Revolusi Indonesia, tentang musuh² Revolusi Indonesia. Juga tentang program pembangunan, Rakyat akan mengetahui tentang tugasnya untuk menjelenggarakan pembangunan yang berwatak anti-imperialisme dan anti-feodalisme, membangun ekonomi nasional melikwidasi ekonomi kolonial yang menjadi sumber pokok daripada kekatjauan dan segala penderitaan Rakyat. Beberapa projek pembangunan untuk Sulawesi yang termuat dalam pola pembangunan seperti dibidang produksi dan distribusi mengenai penambahan produksi beras dan kopra, bersama dengan pembangunan pabrik² untuk mengolah bahan² hasil kelapa, pembangunan perhubungan laut dan pelajaran serta dibidang pemerintahan dengan pembentukan empat provinsi di Daerah Sulawesi, dapat membuka kemungkinan² yang luas untuk memperbaiki tingkathidup Rakyat di Sulawesi. Itulah sebabnya Sdr. Ketua, saya yakin bahwa Rakyat di Sulawesi akan menjambut dengan gembira keputusan² MPRS dan bertekad pula untuk melaksanakannya, karena ia yakin bahwa perjuangannya pasti akan berhasil dan segala pengorbanannya tidaklah sia².

Lebih besar lagi harapan Rakyat terhadap Ketetapan² MPRS, karena Ketetapan² itu adalah hasil daripada semangat persatuan dan gotongrojong yang meliputi seluruh pekerdjaan MPRS. Ini membuktikan bahwa asal

sadja semangat ini dikembangkan setjara konsekwen sampai kepada pelaksanaan keputusan² tersebut disegala bidang, tidak ada satu pekerdjaan bagaimana sulit-pun jang tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan Manipol dan kepentingan Revolusi. Singkatnja agar supaja harapan Rakjat terhadap keputusan² MPRS ini dapat dipenuhi, hendaknjalah putusan² tersebut kita amalkan nanti sesuai dengan suasana jang ada dalam MPRS ini.

Menurut pendapat saja suasana jang mendjadi tjiri pokok dalam sidang MPRS jang mulia ini ialah suasana kerdjasama gotongrojong jang ber-inti persatuan NASAKOM, sedang metode kerdja jang pokok dari MPRS, ialah apa jang dikatakan oleh Kawan Aidit „guided democracy in action”. Inilah jang telah memungkinkan MPRS menjelesaikan tugasnja dengan sukses jang gemilang. Banjak pemitjara dalam sidang ini telah menjerukan supaja suasana dan tjarakerdja jang telah kita alami dalam sidang MPRS ini dikembangkan terus sampai keluar gedung ini sampai ke-daerah², ke-tengah² Rakjat. Djadi bisalah mendjadi kesimpulan kita jang penting, bahwa sjarat pokok untuk suksesnja pelaksanaan keputusan² MPRS ialah mentjiptakan iklim dan suasana persatuan NASAKOM, persatuan seluruh sukubangsa dan dipraktekkannja demokrasi terpimpin mulai dari pusat sampai kebawah.

Adalah tidak tepat pikiran sementara orang jang masih sadja mentjoba mentorpedir semangat dan prinsip kegotongrojongan, dengan Nasakom sebagai intinja bagi semua badan² dan alat² perlengkapan negara, termasuk badan² eksekutif dipusat maupun didaerah, dengan memberikan tafsiran setjara subjektif mengenai Manipol dan Pantjasila. Saja ingatkan sekali lagi utjapan Presiden Sukarno di Surabaya: „Kalau Pantjasila tulen harus setudju Nasakom”.

Satu hal mengenai Sulawesi jang ingin saja singgung setjara khusus ialah masalah pemulihan keamanan. Bagi

tiap orang adalah terang bahwa pemulihan keamanan bukan sadja soal Rakjat di Sulawesi, melainkan adalah per-tama² soal Nasional. Oleh karena itu pemetjahan setjara pokok daripada keamanan di Sulawesi adalah djuga dengan tjara konsekwen melaksanakan prinsip² Manipol dan Djarek terutama prinsip Nasakom dan persatuan seluruh sukubangsa jang ditudjukan terhadap musuh pokok Rakjat dan Revolusi Indonesia ialah imperialisme dan kaum pemberontak kontra-revolusioner. Ini adalah perwujudan dari prinsip mengikutsertakan Rakjat. Tetapi untuk mengikutsertakan Rakjat setjara maksimal sjarat pokoknja ialah mendjamin hak-hak demokrasi bagi Rakjat. Peningkaran terhadap prinsip-prinsip tersebut adalah sengadja atau tidak sengadja penghambatan terhadap usaha pemulihan keamanan jang sungguh². Kenyataan menundjukkan bahwa dengan demikian, daja kekuatan dari Rakjat dan dari front anti-pemberontak diperlemah dengan akibat pemulihan keamanan bisa mendjadi ber-larut². Sedang pengalaman membuktikan bahwa dimana semua kekuatan revolusioner digunakan setjara maksimal terhadap kekuatan pemberontak, disitulah pemulihan keamanan dapat berdjalan dengan lantjar dan tertjipta sjarat untuk menghabiskan samasekali kekuatan pemberontakan baik kekuatan militernja maupun pengaruh politiknya. Saja yakin sepe-nuhnja bahwa djika prinsip² pemulihan keamanan di-djalankan konsekwen menurut prinsip² diatas, keamanan di Sulawesi dan diseluruh Indonesia akan dapat dipulihkan dalam waktu jang ditentukan dalam Djarek, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1962 Rakjat dan Republik Indonesia akan merajakan Hari Proklamasi Kemerdekaannja dalam keadaan aman dan damai, bersih dari segala gerombolan pemberontak, dan pengatjau kontra-revolusioner.

Sdr. Ketua dan Madjelis jang mulia, marilah kita kembali ketempat dan daerah² kita masing², dengan semangat MPRS jang djaja yakni semangat gotongrojong,

demi untuk mensukseskan pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan I.

Hidup persatuan antara semua sukubangsa!

Hidup persatuan N a s a k o m !

Hidup semangat Gotongrojong !

Hidup Republik Indonesia !

J.P. Rissi

Hapuskan sisa² kekuasaan swapradja dan alat² negara jang anti-Rakjat

Saudara Ketua, Madjelis jang mulia,

Dentuman palugodam Pd. Ketua jang mulia pada hari Sabtu jang lalu, diriuhan dalam nada persetujuan dengan aklamasi atas Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana ini, laksana guntur dilangit, menandakan hari akan hudjan dan memberikan harapan kepada Rakjat jang sampai sekarang masih kekeringan dan kehausan sambil memberikan harapan kepada kaum tani, jang selama ini mengalami, segala tanam-tumbuhnja terantjam mati.

Memang Sdr. Ketua, sesuai dengan amanat PJM Presiden, MPRS dengan ditetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan ini telah memberikan djawaban atas Amanat Penderitaan Rakjat itu, jang djuga bersifat Nasional, bersifat Semesta, malah djuga bersifat Berentjana, jaitu direntjanakan oleh kaum kolonialis dan kaum feodalis. Kata orang, se-berat² mata memandang, lebih beratlah bahu jang memikul. Dan kami, bersama saja adalah djuga sebagian dari Rakjat Indonesia jang berdiam didaerah kami, jaitu Sumba, Timor dan Flores jang saja wakili, adalah termasuk golongan Rakjat jang setjara langsung memikul dan merasakan apa jang dinamakan penderitaan Rakjat itu, penderitaan Rakjat jang berasal dan bersumber dari sisa² kolonialisme dan feodalisme karena memang daerah kami adalah daerah

jang masih hidup dalam alam jang penuh derita ini, atau lebih baik saja katakan, masih setengah mati dalam alam penderitaan itu.

Alangkah terharunya saja, tatkala didalam ketetapan MPRS No. II ini tertantum pokok² pikiran, bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, akan membebaskan Rakjat dari penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, akan menegakkan kembali kepribadian dan kebudayaan Indonesia, berdasarkan Demokrasi Terpimpin dan Gotongrojong, dan akan membebaskan ber-djuta² kaum tani dari segala pengaruh buruk kolonialisme-feodalisme dan segala matjam penindasan² lainnja. Konsekwensi dari pokok² pikiran itu antara lain adalah harus adanya Landreform jang mendjaminkan tanah kepada kaum tani penggarap, jang mendjaminkan bahwa tanah sebagai alat produksi tidak akan dijadikan alat penghisap dan pemerasan kaum tuantanah dan kaum feodal pemilik tanah dan jang mengangkat dirinja menjadi jang dipertuan dari kaum tani jang mereka perhambakan dan hanja hidup untuk perbudakan dan karenanja itu, Swapradja² jang masih bersisa didaerah kami ini seharusnya akan dihapuskan, dihapuskan atas segala matjam dan segala bentuk kekuasaannja jang hidup hanja memeras dan menindas Rakjat, memeras dan menindas kaum tani pada khususnya jang djuga didalam MPRS ini saja turut mewakilinja.

Sdr. Ketua jang mulia. Kenapa saja amat terharu akan pokok² pikiran dan rentjana usaha jang saja kemukakan diatas? Telah saja katakan, bahwa Rakjat didaerah kami, termasuk djuga saja sendiri adalah orang² jang langsung merasakan dan memikul segala bentuk kedjahatan penindasan dari sisa² kekuasaan feodalisme jang dulunja menjadi alat dan kuda beban imperialisme-kolonialisme itu.

Izinkanlah Sdr. Ketua jang mulia saja sekedar memberikan sedikit fakta² sebagai bukti, betapa ganasnja penindasan feodalisme jang masih diderita oleh Rakjat

didaerah saja. Fakta² itu akan berbitjara sendiri kepada Madjelis jang mulia, dan fakta² ini akan mejakinkan kepada Madjelis jang mulia betapa tepatnja Ketetapan MPRS hari Sabtu jang lalu dan bersama dengan itu akan mejakinkan pula kepada Madjelis Jang Mulia, kenapa saja menjadi terharu tatkala mendengar palugodam ketua, jang sebagai Guntur Kebebasan memetjah penindasan.

Bukanlah kenjataan² dan praktek biadab jang masih sadsja dilakukan dibeberapa Swapradja Nusatenggara terutama dibagian Timur. Berbitjara tentang „apa jang dinamakan Pengerahan Tenaga Rakjat atau Gotongrojong” a la Swapradja, terkenallah saja akan pengalaman pahit a la Daendels jang baru² ini dilakukan didaerah Swapradja Amarasi. Kaum tani dikerahkan untuk membangun dan memperbaiki djalan² raja jang ber-puluh² kilometer djauhnya dari tempat kediaman mereka, tanpa memperhitungkan waktu jang diperlukan oleh kaum tani untuk mengerdjakan kebun²nja. Mereka diharuskan membawa dan memikul bahan² makanan mereka sendiri dan ber-bulan² tidur di-pinggir² djalan dibawah kolong langit terbuka dengan berbantalkan batu dan berselimutkan pukulan dan hinaan. Bagaikan hewan² dipadang rumput.

Kaum tani jang belum berhasil mentjari bekal untuk mendjalankan tugas rodi Swapradja itu dan karenanja belum dapat mendjalankan tugas jang dinamakan „Gotong-Rojong” oleh tuan² feodal jang dibantu oleh opas² Radja dan mandor² Radja, kaum tani diikat pada batang lehernja dan ditarik dengan kuda kekantor Swapradja, sehingga ada diantaranja jang perlu digotong kerumah sakit. Perampas kebun² kaum tani jang sudah digarap untuk ditanam dalam musim hudjan, adalah praktek jang sudah dianggap wajar oleh tuan feodal di Timor. Tidak hanja itu, seorang pendeta jang mentjoba membela kepentingan kaum tani, disiksa dan dianiaja setjara se-wenang² dan perlu dibawa kerumah

sakit hanya atas tuduhan jang di-buat² bahwa pendeta itu menghasut kaum tani untuk melutjuti sendjata polisi di Fatuleu.

Saja kira para anggota MPRS jang mulia telah mengetahui peristiwa Delha dipulau Roti, dimana rumah² kaum tani miskin jang tidak berdaja dibakar dibumi-hanguskan, sedangkan mereka sendiri dianiaja, disiksa, ditangkap dan dimasukkan dalam cel, dan diantaranya ada jang langsung ditembak oleh polisi. Mereka dituduh tidak mau membajar padjak. Keadaan jang sebenarnya ialah kaum tani itu tidak mampu membajar sekaligus 10 tahun tunggakan padjaknja. Kambing, babi dan barang² lain sudah dibeslah dan dilelang dengan harga jang ditentukan oleh Swapradja. Sekalipun demikian, perampasan itu belum djuga berhasil menghapuskan tunggakan padjak. Karena itu, tuan feodal ini menuntut agar bahan makanan kaum tani miskin jang didapatnja dengan penuh derita, djuga dirampas.

Begitulah Sdr. Ketua, keadaan kaum tani jang masih hidup dalam belenggu dan tjengkeraman feodalisme klas berat dan begitulah nasib kaum tani kita jang merupakan salahsatu kekuatan pokok dalam mentjiptakan kekajaan materiil bagi masjarakat Indonesia di Timor dan djuga merupakan salahsatu kekuatan pokok untuk menjelesaikan tugas revolusi Agustus 1945.

Penghapusan kekuasaan Swapradja seharusnya djuga berarti mengachiri kekuasaan bangsawan tuanbudak jang masih meradjalela dimasjarakat Sumba. Untuk menjelaskan apa artinja kekuasaan tuanbudak bagi Sidang Jang Mulia ini Sdr. Ketua Jth., perkenalkanlah saja memberikan sekedar fakta tentang satu peristiwa jang baru terdjadi dalam pertengahan tahun 1960.

Pada peristiwa penguburan seorang kepala daerah Swapradja Kanatang di Sumba, telah diperintahkan oleh keluarga bangsawan tuanbudak itu untuk membunuh seorang budak wanita ketjintaan almarhum bangsawan sebagai korban-manusia pada upatjara penguburan ter-

sebut. Faham dan adat jang kolot ini menghendaki pengurbanan demikian itu, karena kepentingan seorang tuanbudak didunia, achiratpun perlu mendapatkan pe-lajanan.

Pembunuhan itu dilakukan dalam keadaan se-olah² budak wanita itu „terbunuh dalam keadaan mimpi ber-kelahi”, dengan perhitungan sedapat mungkin luput dari tuntutan hukum pidana. Hal jang demikian ini dianggap biasa oleh keluarga bangsawan tuanbudak terhadap manusia machluk mulia wanita tani miskin jang sudah mati dengan tidak dikehendaki, apalagi perampas gadis dibawah umur dari keluarga tani untuk didjadikan bu-dak oleh kaum bangsawan jang berkuasa. Kecedjaman² jang itu perlu segera diachiri.

Karena itu, Sdr. Ketua, saja selaku putra daerah dari Nusatenggara Timur menjambut baik keputusan pen-ting dan jang bersedjarah ini sambil mendorong selekas mungkin dilaksanakan putusan² penghapusan kekuasa-an Swapradja dan diadakannja retuling pada badan² dan alat kelengkapan Negara di-bidang² legislatif, ekse-kutif, dan judikatif didaerah kami sesuai dengan djiwa dan semangat Amanat Presiden Sukarno „Djalannja Revolusi Kita”, dimana diikutsertakannja Rakjat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mendjamin hak² serta kebebasan² demokratis. Demiki-anlah supaja Rakjat di Nusatenggara Timur dapat pula merasakan kemanfaatan daripada kemerdekaan jang telah diperdjuangkannja itu dalam melawan kekuasaan dan keganasan feodalisme.

Dalam hubungan ini, saja serukan dihadapan Sidang Jang Mulia untuk menuntut pada golongan jang ber-kuasa di Nusatenggara Timur membebaskan kaum tani jang tidak bersalah, telah meringkuk dalam tahanan cel selama lebih dari 6 bulan, hanya karena mereka telah berdjuang melepaskan diri mereka dari belenggu feodal-isme seperti apa jang telah mendjadi keputusan bulat dari MPRS ini.

Mereka meringkuk bukan mentjuri, bukan karena korupsi dan djuga bukan karena sesuatu kedjahatan.

Berbitjara tentang pelaksanaan landreform seharusnya dijalankan setjara konsekwen di Nusatenggara Timur maka kaum tani akan bisa terlepas dari penghisapan feodal dan gadis² tani akan menari serta memainkan sesandonja dengan meraju lagu merdu, karena tjukup sudah derita dialami dan mimpi akan membangun hari depan yang bahagia sudah menunggu dalam kenyataan.

Mari kita likwidasi segala keterbelakangan feodal.

Hidup Rakjat Indonesia... yang tidak mesti kerdja paksa, disiksa dan ditembak mati.

Hidup Nasionalis, Agama dan Komunis.

Hidup N a s a k o m.

Umar Lesteluhu

Bebaskan Irian Barat & lenjapkan sisasisa feodalisme

Saudara Pimpinan yang terhormat dan Sidang Majelis yang mulia,

Saja berbitjara ini adalah sebagai seorang anggota MPRS dari golongan karja tani dan sebagai seorang putera Indonesia yang berasal dari daerah Maluku, yang ingin menyampaikan sebuah sambutan singkat terhadap Pola Pembangunan Semesta Nasional Berentjana ini.

Saja sangat bergembira, sebab dengan disahkannya Pola ini, menjadi suatu pegangan untuk dilaksanakan sebagai langkah pertama untuk menghabisi samasekali imperialisme dan feodalisme, kearah tertjapainja masjarakat yang adil dan makmur.

Sebagaimana daerah² lainnja di Indonesia, Maluku adalah suatu daerah yang kaya dengan rempah² tanahnja subur, teristimewa kaya kopra, kaya ikan dan mutiara, dan lain² hasil tanah dan lautan yang tersedia untuk diolah. Selain daripada itu Rakjatnjanpun memiliki tradisi revolusioner dan ingin madju dalam soal² material dan mental, rohaniah maupun djasmaniah.

Daerah Maluku terdiri dari banyak pulau² tempat lalu lintas kapal² besar dan ketjil. Selain itu djangan dilupakan bahwa Maluku adalah daerah perbatasan dengan Irian Barat yang kini masih didjadjah oleh kolonialisme Belanda. Djustru karena itu mempertinggi taraf hidup Rakjat didaerah Maluku itu serta mema-

djukan pendidikan disana, singkatnja melaksanakan pembangunan didaerah Maluku bukan sadja mempunyai arti meningkatkan kemakmuran Rakjat sadja, tetapi djuga erat sekali hubungannya dengan memperkokoh semangat perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari belenggu kolonialisme Belanda, tambah mejakinkan Rakjat di Irian Barat akan kebaikan Republik, serta mempertinggi prestise negara dalam bidang politik internasional.

Benar sekali jang dikatakan oleh PJM Presiden dalam amanat Pembangunannya pada tanggal 28 Agustus 1960 kepada Depernas al. sebagai berikut (APP hal. 81) :

„Didalam persoalan ini, baik irigasi, maupun intensifikasi, maupun industrialisasi kita tak boleh lepas dari persoalan nation-building. Kita tidak boleh lepas dari persoalan politik. Djangan lupa segala hal ini ada hubungannya dengan persoalan politik pula, misalnja politik perjuangan untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik. Sehingga Sdr.² harus misalnja memikirkan hal irigasi, bukan sadja untuk memberi misalnja imigrasi kepada satu daerah jang memang tanahnya subur, airnja ada, tetapi djuga Sdr. pikirkan daerah jang berdekatan dengan Irian Barat kita beri irigasi agar supaja Rakjat disana benar² mendjadi makmur, agar supaja Rakjat disana benar² mendjadi tjontoh bagi seluruh dunia, bahwa didaerah Republik dekat Irian Barat ada pembangunan jang lebih besar dan lebih hebat daripada di Irian Barat sendiri. Kita perbesar potensi daripada Rakjat, terutama sekali Rakjat diperbatasan dekat Irian Barat itu, kita pertinggikan ia punja potensi, agar supaja perjuangan kita seluruhnja untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik mendjadi kuat”.

Amanat PJM Presiden itu tjukup djelas dan tegas. Tidak berbeda dengan daerah lainnja, Rakjat Maluku jang sebagian besar terdiri dari kaum tani dan

kaum nelajan jang radjin bekerdja, tjinta merdeka, tjinta demokrasi dan mempunyai hasrat untuk membangun. Untuk menimbulkan antusiasme mereka, untuk memobilisasi Rakjat didaerah Maluku dalam pembangunan, berikanlah kepada mereka lebih banyak demokrasi.

Selain itu, perhubungan laut sangat dibutuhkan, sebab masalah perhubungan laut (perhubungan antar pulau) sangat memegang peranan jang mempengaruhi masalah ekonomi pada umumnja, masalah produksi dan distribusi pada khususnya.

Para nelajan supaja diperlengkapi dengan alat² penangkapan ikan, antara lain dengan adanya armada² nelajan, dengan tjukup perahu² besar seperti motor² nelajan dll. sebab dengan demikian mereka bisa dapat memperbanyak hasil produksi ikan dan hasil² laut lainnja seperti kerang, mutiara, tripang dll., dilain pihak turut membantu melantjarkan pengangkutan antar pulau, serta turut membantu keamanan dilaut dari gerakan subversif asing.

Satu hal lagi jang perlu saja kemukakan bahwa pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, hasil mutiara di Maluku (Dobo) digadaikan kepada Australia, jang perusahaannya ketika itu bernama C.T.C. (Celebes Trad. Coy).

Tindakan ini memang sesuai dengan watak pendjajahannya pada waktu itu. Sekarang kita telah merdeka, supaja kita tudjukan perhatian untuk menggali hasil mutiara ini dengan sungguh² sebab hasil tersebut dapat pula menambah devisen negara.

Dalam pada itu, menurut pengalaman setiap rentjana jang baik bisa mendjadi matjet kalau tenaga pelaksanaannya tidak sungguh². Dalam melaksanakan Pola Pembangunan Semesta Berentjana ini dari pusat sampai di-daerah², supaja tenaga² pelaksana benar² ber-djiwa Manipol dalam kata² dan perbuatan.

Saja yakin dan pertjaja, bila Pola Pembangunan Semesta Nasional Berentjana ini dilaksanakan dengan sungguh² dengan berpedoman kepada Amanat Penderitaan Rakjat dan Manipol, dia akan membikin Rakjat lebih gairah dan akan tergembleng semangat Rakjat anti-imperialisme dan kolonialisme untuk membebaskan Irian Barat dan melenjapkan sisa² feodalisme.

Messer Tanggap Peleng

Melaksanakan Demokrasi Terpimpin atas dasar Musjawarah

DENGAN NASAKOM SEBAGAI KEKUATAN POKOK

Sdr. Ketua, Pimpinan Sidang dan Sidang Madjelis
jang mulia.

Pada tanggal 19 bulan jang lalu MPRS telah mengambil langkah besar dan penting dalam sedjarah, jaitu mengambil satu keputusan jang gemilang, menetapkan dan memperkuat Manipol dan perintjiannja jang sudah kuat, karena sudah diterima oleh Rakjat diseluruh Nusantara sebagai Garis² Besar Haluan Negara. Saja katakan ia adalah keputusan jang gemilang, karena Manipol dengan djelas merumuskan dan mendjawab banjak persoalan² pokok Revolusi Agustus 1945 jang anti-imperialisme dan feodalisme.

Kitapun bangga atas lantjarnja permusjawaratan dalam MPRS ini, dalam mengolah Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana hasil karya Depernas, jang achirnja setelah beberapa hari Komisi² bekerdja dengan tidak mengenal lelah, berhasil menetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana mendjadi satu keputusan dengan suara *bulat*. Dengan demikian saja tidak ragu² mengatakan bahwa kebanggaan ini adalah kebanggaan nasional, karena ia seperti jang diutjapkan oleh Sdr.

Njoto dalam pidatonja tanggal 19 November jang baru lalu : „kita terima dengan suara bulat, hati bulat, jang berarti, terbitnja tjahaja jang hebat, tjahaja persatuan segenap kekuatan nasional dengan Nasakom sebagai porosnja dan Manipol sebagai landasannja”. Kenyataan ini sudah sewadjarnja mendjiwai seluruh kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnja dan daerah Kalimantan pada khususnja.

Selama sidang MPRS ini selandjutnja kita menjaksikan demokrasi terpimpin itu dalam aksi, bukan dalam kata², sehingga berhasil dalam waktu singkat dan dengan suara bulat, mufakat menetapkan Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana atas karya Depernas disegala bidang pembangunan, seperti dibidang Mental/Agama/Kerochian/Penelitian, bidang Kesedjahteraan, bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan, bidang Produksi, bidang Distribusi dan Perhubungan, bidang Keuangan dan Pembiajaan. Ini adalah hasil MPRS jang menggembirakan dan bukan sadja dalam sidang Madjelis ini ; tentu hasil ini disambut dengan hangat dan kegembiraan oleh Rakjat Indonesia diseluruh pendjuru tanahair.

Saja selaku putera Indonesia jang berasal dari Kalimantan Tengah, dimana penduduknja terdiri lebih dari 20 anak sukubangsa Daya, menjatakan sambutan jang hangat, dengan rasa gembira atas ketetapan MPRS mengenai Manipol dan Ketetapan no. II MPRS mengenai Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, sebagai hasil masa sidang MPRS jang pertama jang penting dan bersedjarah ini. Ia adalah satu usaha untuk memenuhi apa jang selalu disebut² oleh PJM Presiden Amanat Penderitaan Rakjat. Ketetapan jang telah kita mufakati bersama itu memberi harapan² bagi Rakjat kita.

Misalnja, dibidang produksi sandang, betapa pahitnja kenyataan sekarang, bahwa sebagian besar Rakjat Indonesia terutama kaum tani di Kalimantan Tengah, rata² hanja mempunjai pakaian sepasang setiap orang;

betapa gembiranja kaum tani kalau dalam 2 á 3 tahun mereka akan memiliki pakaian 2 á 3 pasang pula jang pantas. Bahan untuk memenuhi harapan sederhana ini memang banjak, di-hutan² Kalimantan Selatan dan Tengah, selain terdapat pohon² kaju bahan rayon, dju-ga banjak terdapat pohon karet jang dapat dijadikan sasaran bagi produksi rayon. Dalam peremadjaan pohon karet Rakjat sekarang ini, ratusan ribu M³ pohon² karet jang terbuang pertjuma; sedangkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta, bahan rayon diperlukan sampai 49% dari djumlah bahan sandang.

Dibidang produksi pangan adalah satu kenyataan pula, bahwa kaum tani jang semestinja menghasilkan bahan makanan, djustru malah masih me-nunggu² pangan seperti beras jang diimpor dari luarnegeri. Maka dalam hal ini dapat kita bajangkan betapa gembiranja kaum tani di Kalimantan mendapat tanah garapan dengan irigasinja jang mendjamin meningkatnja hasil produksi pangan.

Kita harus menginsjafi pentingnja transmigrasi dari tempat jang penduduknja padat ketempat penduduknja jang sangat kurang dalam rangka memperbanjak hasil produksi pangan ini. Rakjat Kalimantan Tengah setjara luas bersedia menerima para transmigran dengan hati jang terbuka pula. Hanja sadja kami harap perhatian dalam melaksanakan transmigrasi supaja menarik peng-alaman² jang sudah lalu, agar tidak menemui kegagalan jang keempat kalinja, karena kurang sekali persiapan seperti perumahan tidak ada, djaminan hidup jang tidak memenuhi kebutuhan dan perdjandjian, alat kerdja tidak ada, kesehatan tidak terdjamin dsb. Para transmigran jang dimaksudkan itu hampir $\frac{2}{3}$ -nja dididik menggunakan alat pertanian modern (traktor), sedangkan di Kalimantan Tengah hanja diberi satu parang dan satu patjul dan tidak disediakan traktor²nja.

Satu hal jang agak aneh, apabila kaum tani dan Rakjat pekerdja lainnja di Kalimantan Timur dan Tengah setiap tahun diwadjibkan membajar padjak djalan

sedangkan daerah itu boleh dikatakan hampir tidak mempunyai djalan raja samasekali. Kalimantan Timur dan Tengah jang luasnja lk. $2\frac{1}{2}$ kali pulau Djawa hanja mempunyai djalan raja sepanjang 119 Km, itupun tidak terpelihara. Soal² perhubungan daerah ini, adalah soal jang urgen dan mendesak; maka sebelumnja djalan² raja menurut projek Pola Pembangunan Semesta dapat diselesaikan, sebaiknja Pemerintah mengusahakan pengangkutan² sungai, seperti sungai² Barito, Kapuas, Kahajan, Katingan dan Mahakam hingga mendjamin hubungan lalulintas dan kelantjaran² ekonomi daerah itu. Kurangnja pengangkutan sungai bukan sadja mengganggu ekonomi Rakjat, menghalangi kelantjaran distribusi, terhambatnja perdjalanan dinas pegawai negeri, tetapi djuga langsung menimbulkan kerugian bagi perusahaan Negara, tambang batubara Muara Bakah (di Barito) karena hasilnja lk. $\frac{1}{3}$ sadja jang bisa diangkut saban bulan, sehingga Negara tidak memperoleh keuntungan maximum dari perusahaan Negara ini karena kesulitan perhubungan; selain itu untuk menghubungi daerah² jang terpencil djuga penting perluasan perhubungan udara.

Sidang madjelis jang mulia.

Demikianlah beberapa fakta kehidupan dari daerah Kalimantan jang menggambarkan disatu pihak potensi jang besar daerah ini bagi pelaksanaan Pembangunan Semesta Ketetapan no. II MPRS, tetapi dipihak lain masih dikekang oleh sisa² imbalanced kerdja imperialis, seperti al. di Kalimantan Timur dan oleh keterbelakangan feodal, merupakan langkah penting menudju terbukanya potensi tersebut untuk mentjapai tjita² kita bersama, masjarakat jang merdeka penuh dan demokratis, menudju masjarakat adil dan makmur.

Nj. Suharti Suwanto

Pola Pembangunan & kaum Wanita

Sdr. Ketua dan sidang MPRS jang terhormat,

Pola Pembangunan Semesta jang direntjanakan oleh Depernas telah dibahas bersama dalam MPRS dan telah ditetapkan mendjadi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama 1961-1969 dengan Ketetapan No. II/MPRS/1960. Saat ini adalah saat jang bersedjarah bagi Rakjat Indonesia, terutama bagi anggota MPRS jang langsung memberikan andilnja, dimana ikutserta 40 orang anggota wanita. Setelah Pola Pembangunan Semesta itu mendjadi milik kita sekalian, maka kini tergantung pada pelaksanaannja, agar pola itu mendjadi satu realitet.

Diantara para pelaksana pola tidaklah pula dapat di-kesampingkan adanya kenjataan, bahwa kaum wanita perlu diikutsertakan dan mendapat manfaat dari pelaksanaan pola tersebut. Kenjataan itu dapat dilihat dari banjaknja kaum wanita jang mengambil bagian langsung dalam proses produksi. Ditanahair kita terdapat $\pm$ 2 djuta buruh wanita, jaitu 30% dari seluruh kaum buruh. Mereka itu jang banjak bekerdja di-perusahaan² perkebunan (rata² 45%, bahkan diperkebunan teh dan kopi sampai 70%), di-perusahaan² industri ringan rata² 30%, diindustri tekstil dan rokok rata² 60%. Selain

daripada itu lebih dari 50% kaum tani adalah wanita tani, jang radjin bekerdja dilapangan pertanian. Banjak kaum wanita terpeladjar pula jang bekerdja sebagai dokter, hakim, djaksa, bidan, djururawat, guru, insinjur, dan sebagai pedjabat² pemerintah lainnja jang tidak kurang pentingnja.

Djika pola ini dilaksanakan setjara konsekwen dan sungguh², berdasarkan djiwa dan semangat dari Manifesto Politik dan Amanat Pembangunan Presiden, maka setjara tingkat demi setingkat kita pasti akan menudju kemasjarakat adil dan makmur, masjarakat sosialis Indonesia, sesudah dihapuskan sisa² feodalisme dan kolonialisme, jang sudah barang tentu akan membebaskan kaum wanita dari beban berbagai matjam distribusi dan keterbelakangan feodal.

Untuk konsekwen melaksanakan pola ini, maka sjarat jang saja anggap penting ialah perlunja dipegang teguh apa jang dinjatakan dalam Amanat Pembangunan Presiden halaman 27 buku ke-I djilid I, tentang „Menghidupkan potensi Rakjat”. Usaha mengikutsertakan Rakjat tersebut hendaknja senantiasa didasarkan atas bunji UUD 45 fasal 28 jang mendjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan fasal 27, jang mendjamin persamaan hak antara laki² dan wanita, artinja pelaksanaan pola tersebut hendaknja didjalankan tanpa diskriminasi.

Sebagai satu misal perlu saja kemukakan disini, bahwa untuk suksesnja pelaksanaan landreform jang harus disertai dengan demokratisering desa dan industrialisasi, maka perlu didjamin hak² wanita untuk ikutserta dalam rapat² desa, untuk dipilih sebagai kepala desa, untuk mengadakan pendapat²nja bagi pembangunan desa dan mempersoalkan perbaikan djaminan sosial mereka dsb. Oleh karena itu saja menjambut keputusan Komisi C jang telah dilampirkan dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 tersebut jang mengharuskan dihapuskan per-

aturan² seperti IGO, jang melarang wanita mendjabat kepala desa, karena peraturan ini adalah warisan kolonial jang kolot dan tidak sesuai lagi dengan UUD 45 dan Konvensi Hak² Politik Wanita.

Selanjutnja bagi wanita pekerdja, maka ketjuali hak² mereka jang tertjantum dalam UU Kerdja No. 1/51 dilaksanakan, djuga pelaksanaan konvensi no. 100 ILO tentang upah sama untuk pekerdjaan jang sama nilainja, perlu didjalankan baik diperusahaan/djawatan pemerintah maupun diperusahaan swasta. Hendaknja ditjegah adanja massa onslag bagi buruh/pegawai wanita jang sudah kawin, dan sebaliknya hendaknja kepentingan mereka itu dipetjahkan dengan antara lain perlunja mempertimbangkan untuk meratifikasi konvensi² ILO lainnja jang melindungi kaum wanita jang bekerdja seperti Konvensi No. 103 tentang perlindungan keibuan (Protection of motherhood).

Untuk terdjaminnja kesedjahteraan keluarga sebaiknya dipertimbangkan pula untuk segera dikeluarkannja UU Perkawinan jang demokratis jang telah lama menjadi tuntutan perdjuaan kaum wanita.

Demikianlah antara lain sambutan dan harapan saja tentang perlunja pola tersebut dilaksanakan tanpa diskriminasi, dan perlunja segera diretul sikap, pandangan maupun peraturan/per-undang²an jang tidak sesuai dengan alam Manifesto Politik dari amanat Pembangunan Presiden.

Chususnja dibidang pendidikan, maka saja menjambut ketetapan MPRS jang termaktub dalam lampiran A, hasil komisi A, jang menegaskan garis pendidikan nasional kita, jaitu „Politik dan sistim pendidikan nasional kita baik jang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaja melahirkan warganegara Indonesia jang berdjiwa Pantjasila dan berdjiwa patriot komplit, supaja melahirkan tenaga² kedjuruan jang ahli dan berdjiwa Revolusi Agustus 45,

suatu politik dan sistim pendidikan yang menitikberatkan pendidikan kedjuruan".

Mengingat sangat pentingnja peranan pendidikan ini bagi terlaksananya pembangunan haridepan tanahair kita, maka sudah sewadjarnya bilamana setiap orangtua murid dan organisasi² massa lainnja termasuk organisasi² wanita mengambil peranan untuk mendorong putra-putri kita menempuh pendidikan yang menghasilkan ahli² yang praktis dan segera dibutuhkan oleh masyarakat, serta menjegah diratjuninja anak² kita dari kebudayaan asing yang merusak.

Selain daripada itu patut pula disambut keputusan MPRS untuk menetapkan pendidikan Taman Kanak² menjadi pola projek, mengingat hal ini sudah merupakan kebutuhan kaum ibu yang mendesak. Dalam hal penjatu-ragakan pendidikan dirumah dan pendidikan disekolah, maka kaum ibu seharusnja mengambil peranan yang penting dalam organisasi² POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) untuk membantu supaya anak² kita menjadi pandai dan patriotik.

Demikianlah menurut pendapat saya pada umumnya pola itu djika dilaksanakan dengan sungguh² dan konsekwen, maka dia akan merupakan tahapan pertama menuju masyarakat baru yang memberi manfaat bagi kesedjahteraan keluarga dan kebahagiaan anak².

Marilah kita mengedapkan apa yang dinjatakan oleh Ibu Kartini tentang djaman baru itu, yang terdapat didalam tulisannja dalam buku *Habis gelap terbitlah terang* sbb. :

"Daripada mati itu akan tumbuh kehidupan baru. Kehidupan baru itu tiada dapat di-tahan², dan meskipun sekarang dapat djuga di-tahan², besoknja akan tumbuh djuga dia, dan hidup makin lama makin kuat dan makin teguh". Berbahagialah kita hidup pada masa kini!

Masa perubahan dimana masa kuno beralih menjadi masa baru!"

Sukatno

Harapan kita sekarang tertudju pada pelaksanaan yang konsekwen dari keputusan² MPRS

Saudara Pimpinan Jth.

Madjelis Jang Mulia,

Perkenankanlah saya menjatakan kegembiraan yang besar dalam menjambut hasil kerja persatuan yang bersejarah dari musjawarah² kita selama empat pekan ini. Kegembiraan saja ini adalah sebagian sadja dari kegembiraan ber-djuta² generasi muda Indonesia yang sedang bekerdja di-pabrik², kantor² dan disawah dan ladang, yang beladjar di-bangku² sekolah rendah sampai ke-universitas dan yang dengan penuh harapan menatapkan pandangannja kepada pekerdjaan kita.

Sungguhlah kelahiran yang tepat pada waktunja. Disahkannya garis² besar haluan negara dan haluan pembangunan serta pedoman² pelaksanaannja oleh MPRS, adalah sangat bertepatan dengan makin tingginja kesadaran politik pemuda² kita. Kesedaran politik yang meninggi ini dinjatakan dalam sikapnja yang makin kritis terhadap segala sesuatu, terhadap semua yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan tanahair dan Rakjat kita di-bidang² politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan termasuk hasil² pekerdjaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan pelaksanaannja.

Tidaklah pula saya lebih²kan, apabila saya katakan bahwa harapan dari generasi yang paling berkepenting-

an bagi perkembangan dimasadepan dari tanahair dan Rakjat Indonesia itu telah mendapatkan djawaban jang membesarkan hati, dengan disempurnakan dan disahkannya Garis² Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama Delapan Tahun. Sinar jang per-tama² saja lihat dengan adanya Pola Pembangunan Semesta ini, adalah didalam pelaksanaannya bisa mendorong pemetjahan salahsatu problem nasional jang sangat vital dan jang sangat langsung menjangkut penghidupan pemuda, jaitu pembukaan lapangan² kerdja baru. Saja katakan sinar, oleh karena memang demikianlah keadaannya, bahwa tidak sedikit pengaruh daripada berlangsungnya krisis² ekonomi jang menimpa kehidupan tanahair dan Rakjat kita selama ini telah menjiptakan kabut jang kian hari kian menebal dihadapan jalannya madju para remadja kita. Ditambah lagi dengan tak henti²nja berketjamuk teror dan subversi dari kekuatan² kaum imperialis dan kontra-revolusioner disebagian besar wilayah dan desa² kita tertjinta, telah banjak merusak kehidupan djasmani dan rohani dari pemuda² Indonesia, terutama pemuda² tani dan pemuda² pekerdja lainnja.

Salahsatu sifat jang chas dari manusia muda, adalah mau madju dan didalam waktu jang singkat ingin merebut sesuatu jang gemerlapan djauh dihadapannya dengan semangat jang me-njala², tidak hanya untuk kepentingannya sendiri akan tetapi untuk seluruh masadepan tanahair dan bangsa. Tetapi alangkah banjaknja sudah pemuda² kita jang diketjewakan oleh tidak sesuaija realisasi tjita² dengan pahit-getirnja kenjataan se-hari². Semangat beladjar jang me-njala² didalam gedung² sekolah atau universitas, dipaksa oleh kenjataan harus membeku pada saat² hampir sampai pada taraf² terachir, karena tidak menentunja nasib jang menanti di-tengah² masjarakat. Ini bagi pemuda² jang sempat berbahagia menduduki bangku² sekolah. Bagi pemuda² jang dirampas hak²nja untuk memiliki kesem-

patan itu oleh keadaan, dan ini merupakan bagian jang tidak ketjil dari pemuda² kita, terutama pemuda² tani, nasib jang dihadapi mendjadi lebih tidak menentu lagi. Demikian tadjamnja kontradiksi² jang ditjiptakan oleh wadjarnya tjita² dengan pahitnja kenjataan hidup kita se-hari².

Saudara Ketua, Gelombang daripada kontradiksi² itu tidak hanya menjebakkan satu dua pemuda jang kehilangan pegangan dan jang dihinggap oleh gedjala² negatif seperti atjuh tak atjuh, spekulasi dan bahkan mistik, akan tetapi sebaliknya gelombang daripada paradox² itu malah melahirkan gerakan pemuda Indonesia jang berkesedaran politik jang tinggi. Inilah jang saja katakan, bahwa putusan² MPRS ini adalah kelahiran jang tepat pada waktunja, dimana bagian terbesar daripada Indonesia akan menjambutnja dengan sikap jang kritis, sikap jang tak terpisahkan dengan gerakan revolusioner Rakjat kita jang sedang berdjuaug untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²nja.

Madjelis jang mulia kiranja sependapatlah dengan saja, bahwa pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta jang harus sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia dan Amanat Pembangunan Presiden, ketjuali memberikan sedikit sinar bagi terbukanya lapangan² kerdja baru (werkverschaffing), tenaga² pembangunan djuga harus dipersiapkan dengan baik dikalangan pemuda². Dan pelaksanaan daripada kepentingan ini haruslah sedjalan dengan pelaksanaan pembangunan chususnja dibidang pendidikan. Adalah tepat sekali djawaban jang telah diberikan oleh hasil² musjawarah Madjelis kita didalam hal ini, jaitu jang menekankan bahwa semangat pembangunan itu harus menguasai sistim pendidikan kita. Dan mengenai hal ini pelaksanaannya tidak hanya terbatas dengan mengubah imbangan memperbesar djumlah fakultas untuk pengetahuan exakta dibanding dengan pengetahuan sosial pada pen-

didikan tingkatan universitas, akan tetapi yang lebih penting adalah didalam bentuk memperbanyak sekolah² ke-djuruan pada tingkatan menengah. Djuga pada tingkatan sekolah rendah, untuk menanamkan semangat pembangunan itu saja berpendapat tepatlah apabila pendidikan politeknik dijadikan salahsatu unsur peladjaran yang penting.

Dalam pada itu persoalan yang tak kalah pentingnja, adalah meluaskan pelaksanaan pendidikan aplikasi bagi para buruh dan pegawai² muda, untuk mempertinggi ketjakapannja. Dilaksanakannja pendidikan aplikasi ini dengan sungguh², pasti djuga akan mempertinggi dan memperbesar rasa tanggungjawab mereka kepada tugas² pekerdjaan yang dipikulnja. Kepada pemuda² tani sebagai kekuatan produktif yang paling segar di-desa², harus pula diberikan perhatian yang sungguh², terutama didalam usaha mempertinggi tingkat kebudajaannja. Disamping usaha yang intensif dalam aktivitet pemberantasan butahuruf, hendaknja disedjalkan pembangunan balai² pemuda di-desa².

Semuanja ini saja kemukakan didalam semangat dengan sungguh² berusaha untuk menuangkan perasaan dan fikiran yang penuh tanggungjawab daripada generasi muda kita menjambut sekilas sinar yang dipantjarkan oleh Pola Pembangunan Semesta Berentjana. Namun demikian saja mohon perhatian yang sungguh² dari Madjelis yang mulia, dari semua yang dengan sungguh² sedang mengarahkan pandangannja kepada kebesaran tanahair dan bangsa Indonesia dimasadepan, bahwa kesungguhan dan tanggungjawab pemuda ini harus disambut dengan selajaknja pula. Dapatkah misalnja, orang mengandjurkan supaya pemuda² kita belajar yang baik dan malahan dengan bendera „studi terpimpin“ tetapi tanpa ada ke-sungguh²an untuk memenuhi kebutuhan belajar dan diturunkannja harga buku² ilmu pengetahuan? Dapatkah orang mengandjurkan supaya pemuda² kita bermoral yang baik, tetapi didalam praktek

lebih suka membiarkan beredarnja madjalah² atau batjaan a la Picolo dan „Varia“ daripada memperkenankan diterbitkannja madjalah atau batjaan yang berguna bagi pendidikan pemuda? Dapatkah orang mengandjurkan supaya pemuda² mentjintai kerdja dan pabrik² untuk mempertinggi produksi, akan tetapi didalam praktek lebih suka melihat modal asing meradjaalela menguras keuntungan dan kekajaan tanahair kita daripada melihat Republik dan modal Indonesia menguasai sumber² kekajaan kita? Dapatkah orang mengandjurkan pemuda² kita mentjintai desa dengan segala kesuburannja, akan tetapi didalam praktek lebih suka melihat tuan-tanah dan lintahdarat be-ramai² mentjintang nasib tanimiskin dan buruh-tani daripada melihat kaum tani be-ramai² mengerdjakan tanah garapannja sendiri atau tanahnja orang lain dengan sewa yang murah? Dapatkah orang mendidik patriotisme pemuda² kita dengan mengadajarkan bahwa wilajah Republik Indonesia yang sah adalah terbentang dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi didalam praktek aksi² pemuda untuk pembebasan Irian Barat harus dipersulit? Hanja dengan konsekwenan untuk melenjapkan kepintjangan² ini, maka kesungguhan dan rasa tanggungjawab generasi muda kita dijawab dengan semestinja.

Kesedaran politik dan sikap kritis pemuda berdiri dengan tegas diatas landasan semangat persatuan yang makin kokoh dikalangan pemuda. Digatedung kita yang bersedjarah ini, beberapa bulan yang lalu Manifesto Politik Republik Indonesia telah menggugah dan menjatukan semua kekuatan revolusioner dikalangan pemuda, yang diilhami oleh aliran² besar Rakjat kita, Nasionalis, Agama dan Komunis. Jaitu didalam Kongres Pemuda Seluruh Indonesia bulan Februari tahun 1960 ini. Sekarang lembaga kedaulatan Rakjat yang tertinggi, didjiwai oleh Undang² Dasar 45 telah meletakkan rel revolusi Manifesto Politik Republik Indonesia dan pedoman² pelaksanaannja. Persatuan revolusioner pemuda

Indonesia ber-sama² dengan seluruh kekuatan revolusioner Rakjat Indonesia, akan mendjadi pelaksana² jang militan. Dan bersamaan dengan itu, mendjadi pengawas-pengawas jang kritis terhadap kemampuan para petugas didalam mengikuti irama zaman, jaitu irama Manifesto Politik dan irama „Djalannja Revolusi kita”.

Sedjarah perjuangan Rakjat kita telah membuktikan, bahwa dengan tanpa mementingkan diri sendiri, pemuda selalu siap untuk ikut tampil dibarisan depan Rakjat kita, didalam perjuangan mempertahankan dan membangun Republik, untuk melawan imperialisme dan melenjakkan sisa² feodalisme. Malahan diminta, didalam membangun Pertahanan Rakjat Semesta sebagai salah-satu djaminan bagi pengamanan pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berentjana, dan untuk membersihkan sisa² pengganggu keamanan dari kaum kontra-revolusioner dan subversi kaum imperialis, sudah dimulai pelaksanaan wadji² militer dan wadji² latih bagi Rakjat, chususnja bagi pemuda² taraf demi taraf.

Ketetapan MPRS RI

No : I/MPRS/1960 tentang

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS² BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.

Dalam Rapat Pleno ke-4 Sidang Pertama pada tanggal 19 November 1960 di Bandung.

Setelah membahas :

1. *Amanat Negara jang diutjapkan oleh Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada hari Pahlawan 10 November 1960 :*

2. *Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959, jang berdjulud „Penemuan kembali Revolusi kita” dan jang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia :*

3. *Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang „Perintjian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959” tertanggal 25 September 1959 No. 3/ Kpts/Sd/II/59, jang telah disetudjui oleh Presiden dalam „Kata Pengantar” Manifesto Politik Republik Indonesia pada hari Pahlawan 10 November 1959 :*

4. *Amanat Presiden pada Sidang Pleno pertama Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis, jang mendjadi bagian daripada haluan Negara :*

5. *Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 jang terkenal dengan nama „Djalannja Revolusi Kita” jang*

mendjadi pedoman pertama daripada pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia :

6. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 yang diucapkan dimuka Sidang Umum P.B.B. yang berjudul "To build the world anew" (Membangun dunia kembali) ;

Menimbang : bahwa perlu segera ditetapkan garis besar daripada haluan Negara dengan bagian²nja serta pedoman² pelaksanaannja ;

M e n g i n g a t :

1. Amanat Penderitaan Rakyat yang tergambar dalam Pembukaan Undang² Dasar 1945 ;

2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 5 Djuli 1959 ;

3. Undang² Dasar 1945.

a. Pasal 1 ayat 2 yang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah ditangan Rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat” ;

b. Pasal 3 jo pasal IV Aturan Peralihan ;

c. Pasal 2 ayat 3 ;

4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 ;

5. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 ;

6. Bahwa Rakyat Indonesia diseluruh kepulauan Nusantara Indonesia telah menerima dan mempertahankan Manifesto Politik Republik Indonesia serta diperintjiannja ;

M e n d e n g a r :

Permusjawaratan dalam rapat² MPRS pada tanggal 17 s/d 19 November 1960 :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Ketetapan tentang garis² besar daripada haluan Negara sebagai berikut :

P a s a l I.

Memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta diperintjiannja sebagai garis² besar daripada haluan Negara.

P a s a l II.

Amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959 yang diucapkan dan yang tertulis adalah garis² besar daripada haluan pembangunan.

P a s a l III.

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama „Djalannja Revolusi Kita” dan pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka Sidang Umum PBB yang berjudul "To build the world anew" (Membangun dunia kembali) adalah pedoman² pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

P a s a l IV.

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan² ini.

Ditetapkan dikota Bandung pada tanggal
19 November 1960

MADJELIS PERMUSJAWARATAN
RAKJAT SEMENTARA

Chaerul Saleh

Mr. Ali Sastroamidjojo

K.H. Idham Chalid

D.N. Aidit

Kol. Wilujo Puspojudo

Ketetapan MPRS RI

No : II/MPRS/1960, tentang

GARIS² BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.

Dalam Rapat Pleno ke-5 tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama di Bandung,

Setelah membahas :

„Rantjangan Dasar Undang² Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961-1969” hasil karya Depernas, dan menelitinja atas dasar Amanat Pembangunan Presiden pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis sebagai garis² besar daripada haluan pembangunan ;

Menimbang :

1. bahwa perlu segera ditetapkan Garis² Besar Pembangunan serta ketentuan² pokok pelaksanaannya ;
2. bahwa pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah suatu pembangunan dalam masa peralihan jang bersifat menjeluruh untuk menudju tertjapainja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila atau Masjarakat Sosialis Indonesia dimana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat ;
3. bahwa pembangunan Nasional Semesta Berentjana delapan tahun : 1961-1969 adalah pembangunan

tahap pertama, jang nasional, semesta, berentjana dan berisikan tri-pola untuk meletakkan dasar² pembangunan rochaniah dan djasmaniah jang sehat dan kuat serta pembangunan tata-perekonomian nasional jang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang-surutnja pasaran dunia ;

4. bahwa sjarat pokok untuk pembangunan rochaniah jang sehat dan kuat adalah a.l. mengakkan kembali kepribadian dan kebudayaan Indonesia jang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotongrojong seperti didjelaskan dalam dasar negara Pantjasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahadja dan kedjudjuran sesuai dengan adjaran ke-Tuhan-an jang Maha Esa ;

5. bahwa sjarat pokok untuk pembangunan tata-perekonomian nasional adalah a.l. pembebasan ber-djuta² kaum tani dan Rakjat pada umumnja dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan „landreform” menurut ketentuan² hukum Nasional Indonesia, seraja meletakkan dasar² bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat jang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara.

Mengingat :

1. Amanat Penderitaan Rakjat jang terkandung dalam Pembukaan Undang² Dasar RI 1945 ;
2. Pasal² 27 ayat 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 UUD RI 1945 ;
3. Pasal 1 ayat 2 UUD RI 1945 jang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat” ;
4. Pasal 3 jo. pasal IV Aturan Peralihan Undang² Dasar RI 1945 ;
5. Pasal 2 ayat 3 Undang² Dasar RI 1945 ;
6. Amanat Negara jang diutjapkan oleh Presiden

pada pembukaan Sidang Pertama MPRS tanggal 10/11-1960;

7. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara RI No. I/MPRS/60 tanggal 19 November 1960 tentang „Manifesto Politik RI sebagai Garis² Besar daripada haluan Negara”;

8. Permusjawaratan dalam rapat² Komisi², musjawarah dan mufakat Pimpinan MPRS dengan Badan Pembantu Musjawarah (BAPEMUS) dan rapat² MPRS pada tanggal 17/11-60 sampai dengan 3 Desember 1960.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Ketetapan tentang Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969 sbb. :

B A B I

G A R I S² B E S A R P O L A P E M B A N G U N A N

P a s a l 1.

(1) Menjatakan bahwa garis² besar Pola Pembangunan termasuk Pola Proyek yang dimuat dalam Rantjangan Dasar Undang² Pembangunan Nasional Semesta Berentjana delapan tahun 1961-1969 hasil karya Depernas yang termuat dalam Buku kesatu (1) djilid I, II, dan III pada umumnja sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden tanggal 28/8-59 yang diutjapkan maupun yang tertulis dan pada umumnja sesuai pula dengan Manifesto Politik RI yang telah diperkuat oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan ketetapan No. I/MPRS/1960.

(2) Menerima Garis² Besar Pola Pembangunan hasil karya Depernas seperti termuat dalam Buku kesatu djilid I, II, III sebagai Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dengan ketentuan² seperti termuat dalam pasal² dibawah ini.

B A B II

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 2.

B I D A N G M E N T A L / A G A M A K E R O C H A N I A N / P E N E L I T I A N

(1) Melaksanakan Manifesto Politik dilapangan pembinaan Mental/Agama/Kerochian dan Kebudayaan dengan mendjamine sjarat² spirituul dan materiil agar setiap warganegara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh² buruk kebudayaan asing.

(2) Menetapkan Pantjasila dan Manipol sebagai mata pelajaran diperguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.

(3) Menetapkan pendidikan agama mendjadi mata pelajaran di-sekolah² mulai dari Sekolah Rakjat sampai dengan universitas² negeri dengan pengertian bahwa murid² berhak tidak ikutserta apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannya.

(4) Membina se-baik²nja pembangunan rumah² ibadah dan lembaga² keagamaan.

(5) Menjelenggarakan kbidjaksanaan dan sistim pendidikan nasional yang tertudju kearah pembentukan tenaga² ahli dalam pembangunan sesuai dengan sjarat² manusia Sosialis Indonesia yang berwatak luhur.

(6) Mengusahakan agar segala bentuk dan perwujudan kesenian mendjadi milik seluruh Rakjat dan menjinarkan sifat² nasional.

(7) Memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak Rakjat dan massa revolusioner.

(8) Kbidjaksanaan penelitian disesuaikan dengan politik luarnegeri bebas dan aktif serta mengikutsertakan Rakjat tanpa meninggalkan sjarat² ilmiah.

P a s a l 3.

BIDANG KESEDJAHTERAAN

(1) Kebidjaksanaan pembangunan dibidang kesedjahteraan ditudjukan untuk mewujudkan kesedjahteraan Rakjat jang merata dalam keseluruhannja.

(2) Mendjamin setiap warganegara akan pekerdjaan dan penghasilan jang lajak guna memenuhi keperluan hidup se-hari² bagi dirinja sendiri beserta keluarganja, seperti a.l. keperluan sandang-pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan kebudayaan dan keagamaan serta djaminan untuk hari tua.

(3) Membangunkan usaha² khusus untuk meninggi-kan tingkat hidup kaum buruh, tani, nelayan dan kaum pekerdja pada umumnja dengan menghapuskan beban² sebagai peninggalan dari hubungan kerdja kolonial dan feodal serta memberantas pengangguran.

P a s a l 4.

BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/ PERTAHANAN

(1) Untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana delapan tahun : 1961-1969, diperlukan penjesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnja dalam rangka pelaksanaan Manipol dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana serta Ketetapan² MPRS.

(2) Mengikutsertakan Rakjat dan seluruh alat-kelengkapan serta seluruh semangat dan daja-kerdja bangsa dalam suatu gerakan massa (massa-aksi) jang berbentuk satu organisasi Front Nasional.

(3) Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta jang berdasarkan prinsip bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan.

(4) Pertahanan negara RI bersifat defensif-aktif dan bersikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan Rakjat semesta jang berintikan tentara sukarela dan milisi.

(6) Mengingat bahwa djalaninja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan maka perlu dilaksanakan pembangunan tata-perdesaan jang demokratis (democratic rural development) jang merata dan berentjana sebagai salahsatu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional semesta.

P a s a l 5.

BIDANG PRODUKSI

(1) Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961-1969 supaya ditudjukan kearah pengutamaan produksi bahan keperluan hidup Rakjat jang pokok untuk mentjapai taraf mentjukupi keperluan sendiri serta menudju kearah pembagian pendapatan nasional jang adil dan merata.

(2) Tjabang² produksi jang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hadjat hidup Rakjat banjak, dikuasai oleh Negara, djika perlu dimiliki oleh Negara.

(3) Untuk mengembangkan daja produksi guna kepentingan masjarakat dalam rangka ekonomi terpin-pin, perlu diikutsertakan Rakjat dalam pengerahan semua modal dan potensi (funds and forces) dalam negeri, dimana kaum buruh dan tani memegang peranan jang penting.

P a s a l 6.

BIDANG DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN

(1) Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang² keperluan hidup se-hari² agar dapat sampai

ditangan Rakjat dengan tjepat, tjukup, merafa, murah dan baik.

(2) Pemerintah mengatur dan menjalurkan distribusi bahan² penting bagi penghidupan Rakjat banjak dengan mengutamakan ikutsertanja koperasi², rukun² kampung, rukun² tetangga serta sedjenisnja dan swasta Nasional sebagai pembantu.

(3) Pemerintah menjelenggarakan impor barang² kebutuhan pokok untuk Rakjat dan bahan² baku serta bahan² penolong untuk industri vital dan menguasai ekspor bahan² baku.

(4) Negara menguasai dan menjelenggarakan perhubungan dan angkutan didarat dan laut yang vital serta angkutan udara dan perhubungan telekomunikasi seluruhnja.

P a s a l 7.

BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN

(1) Sumber pembiayaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu per-tama² harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds und forces) yang progresif, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban Rakjat.

(2) Djika modal nasional guna pembiayaan pembangunan belum mentjukupi, dapat diadakan kerdjasama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luarnegeri; dengan ketentuan bahwa hal tsb.:

- a. tidak bertentangan dengan Manipol dan Amanat Presiden tentang Pembangunan;
- b. disusun dalam per-undang²an ber-sama² dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian nasional yang kuat dan bebas, diperlukan adanja suatu sistim moneter yang sehat dan stabil guna melantjarkan

produksi, distribusi dan perdagangan, serta peredaran uang yang berentjana.

P a s a l 8.

KETENTUAN PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun : 1961-1969, maka hasil karya Depernas Djilid IV sampai dengan XVII perlu diperhatikan oleh Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan manakala tidak bertentangan dengan ketetapan ini.

(2) Untuk mendjamin berlangsungnja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun : 1961-1969 pelaksanaan pembangunan ditetapkan dengan ketentuan² per-undang²an.

B A B III

LAMPIRAN-LAMPIRAN

P a s a l 9.

(1) Pada Ketetapan ini diikutsertakan tiga lampiran yang dinamakan Lampiran A, Lampiran B dan Lampiran C.

(2) Lampiran A tersebut pada ajat (1) diatas merupakan penjempurnaan daripada Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana karya Depernas, sedangkan Lampiran B dan Lampiran C merupakan pedoman bagi pelaksanaannja.

(3) Isi Lampiran A mempunyai kekuatan sebagai amandemen² daripada Buku kesatu Djilid I, II dan III.

BAB IV

KEKUASAAN PENUH

Pasal 10.

Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi AP/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan² ini.

Ditetapkan di kota Bandung pada tanggal:
3 Desember 1960.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

BAB III

Chaerul Saleh

Mr. Ali Sastroamidjojo

K. H. Idham Chalid

D. N. Aidit

Kol. Wilujo Puspodjo

Joop Morriën
Amsterdam

I S I

Katapengantar	3
D.N. Aidit — Putusan ² MPRS harus dilaksanakan dengan tenaga ² anti-imperialisme dan anti-feodalisme yang lebih konsekwen	5
Njoto — Alasan ² golongan Komunis memperkuat Manipol dan Perperintjiannya sebagai garis ² besar daripada Haluan Negara	9
Ir. Sakirman — Sjarat ² pokok pelaksanaan pembangunan	15
Njono — Soal kesedjahteraan dalam sidang MPRS	27
Asmu — Landreform dan industrialisasi adalah loro-loroning atunggal	31
Nursuhud — Perbedaan pokok „rentjana pembangunan” PRRI-Permesta dengan garis ² pola pembangunan MPRS	35
Karel Supit — Ketetapan ² MPRS sendjata baru untuk melawan musuh ² Rakjat	41
J.P. Rissi — Hapuskan sisa ² kekuasaan swapradja dan alat ² negara yang anti-Rakjat	47
Umar Lesteluhu — Bebaskan Irian Barat & lenjapkan sisa ² feodalisme	53
Messer Tanggap Peleng — Melaksanakan Demokrasi-Terpimpin atas dasar musjawarah	57
Nj. Suharti Suwanto — Pola pembangunan dan kaum wanita	61
Sukatno — Harapan kita sekarang tertudju pada pelaksanaan yang konsekwen dari keputusan ² MPRS	65
Ketetapan MPRS RI No. I/MPRS/1960	71
Ketetapan MPRS RI No. II/MPRS/1960	74

Pp. 15.—